

BAB III

AKUNTABILITAS

III.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja di Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan RKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9)	(10)	(11=10/9*100)	(12)	(13=10/12*100)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	sedang	34.811	116,04	3	3,24	108,02	3,2	101,27
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	98,65	98,65	100	95,78	95,78	100	95,78
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	3.1	Nilai Sakip (Komponen Pelaporan)	%	12	10,22	85,17	12	14,16	118,00	12,5	113,28
		3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100	98	98	90	96,37	107,08	100	96,37
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A(88,30)	A(88,75)	100,51	88,31	91,81	103,96	88,31	103,96
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	5.1	PersentasePengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	100	79,2	79,2	90	85,74	95,27	100	85,74
6	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	78	69,07	88,55	79	81,9	103,67	80	102,38

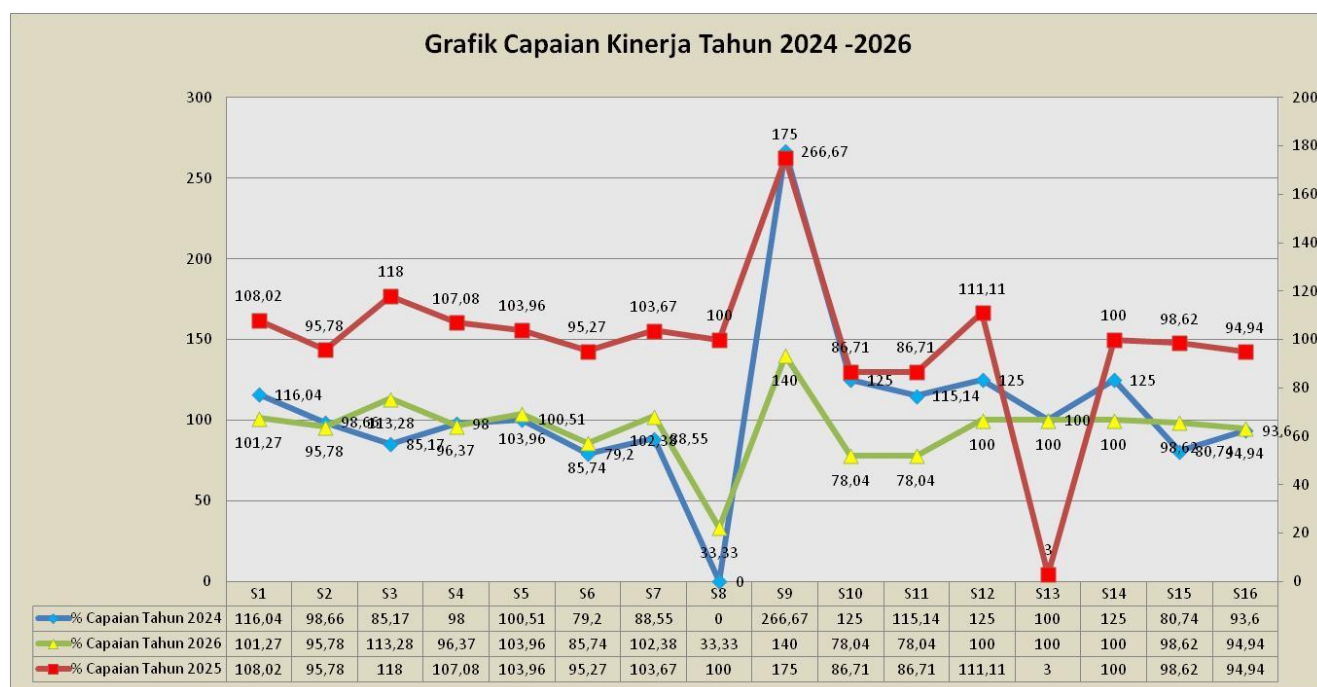
7	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di Fasilitas	Kecamatan	2	–	–	2	2	100,00	6	33,33
		7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUM N/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen MoU	15	40	266,67	20	35	175,00	25	140,00
8	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	80	100	125	90	78,04	86,71	100	78,04
		8.2	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	%	80	92,11	115,14	90	78,04	86,71	100	78,04
9	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	80	100	125	90	100	111,11	100	100,00
10	Berkembangan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	10.1	Jumlah PD Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	3	100	PD	3	3	3	100
		10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	%	80	100	125,00	%	80	100	100	100
		10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	56,52	80,74	%	70	98,62	80	98,62
		10.4	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	93,60	93,60	%	100	94,94	100	94,94

Tabel 3.2 Capaian Kinerja di renstra Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
											Target	% capaian	
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	3,2405	98,20	A (80,38)	110,46	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	95,78	95,78	A (4,85)	88,04	Biro Hukum dan Ham
			1.3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	1.3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)	%	12,00	14,16	118,00	2,4	83,33	Biro Organisasi
					1.3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	90	96,37	107,08	86,5	111,79	Biro Humas dan Protokol
			1.4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	1.4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,31	91,81	100,50	100	100	Biro Organisasi
			1.5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	90	85,74	95,27	100	78,04	Biro Administrasi Pembangunan
			1.6	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	79	81,90	103,67	90	105,86	Biro Barang dan Jasa
			1.7	Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum	1.7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	2	100,00	81	101,11	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

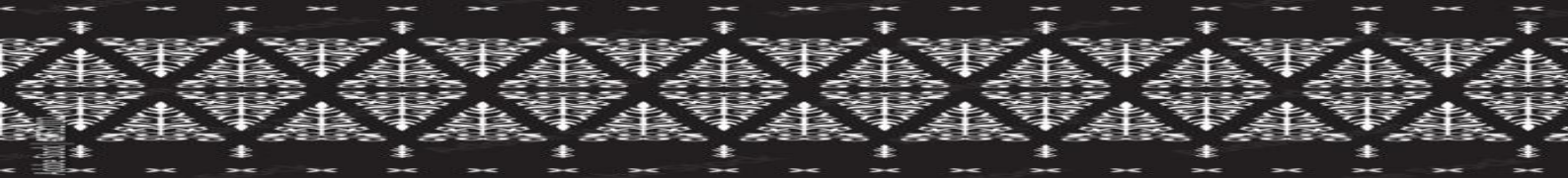
				Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	20	35	175,00	46	82,61	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.8	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	90	78,04	86,71	90	111,11	Biro Perekonomian
					1.8.2	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	90	78,04	86,71	51	68,62	Biro Perekonomian
			1.9	Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	1.9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	90	100	111,11	3,3 (Sedang)	98,20	Biro Kesejahteraan Rakyat
					1.9.2	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	90	100	111,11	100	95,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			1.10	Berekembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	1.10.1	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	3	100,00	A (80,38)	110,46	Biro Organisasi
					1.10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	100	125,00	A (4,85)	88,04	Biro Organisasi
					1.10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	98,62	140,89	2,4	83,33	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.10.4	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	94,94	94,94	86,5	111,79	Biro Umum dan Perlengkapan

Grafik Capaian Kinerja Sekretariat Berdasar RPD 2024-2026



Grafik Capaian Kinerja Sekretariat Berdasar RPJMD 2025-2029





Analisis Capaian Kinerja per Sasaran dan Indikator

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator: Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Target tahun 2025 sebesar 3, sedangkan realisasi mencapai 3,24 dengan tingkat capaian 108,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi perangkat daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah.

2. Sasaran: Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator: Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM

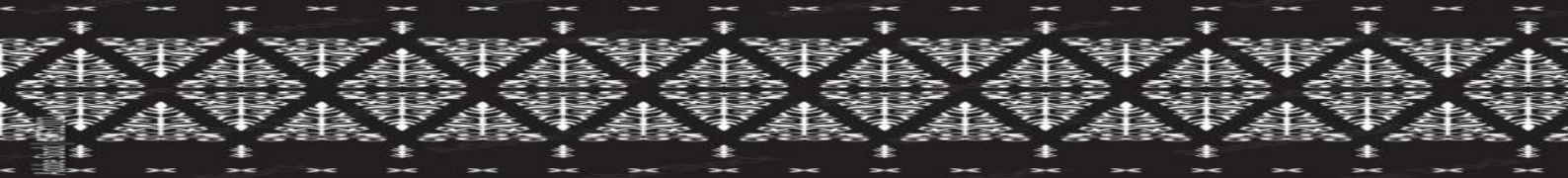
Target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi 95,78% sehingga capaian kinerja sebesar 95,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk hukum daerah dan penanganan perkara telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan regulasi serta proses harmonisasi dan fasilitasi produk hukum yang memerlukan waktu lebih panjang.

3. Sasaran: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas

Indikator 3.1

Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)

Target tahun 2025 sebesar 12, dengan realisasi 14,16, sehingga capaian kinerja mencapai 118%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah yang semakin akuntabel dan transparan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan sistem pelaporan, evaluasi internal, serta peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP.



Indikator 3.2

Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai

Target sebesar 90% dengan realisasi 96,37% sehingga capaian mencapai 107,07%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik melalui koordinasi antar perangkat daerah dan optimalisasi fungsi fasilitasi oleh Sekretariat Daerah.

4. Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat

Target indeks sebesar 88,31, sedangkan realisasi mencapai 91,81 dengan capaian 103,96%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan yang ditunjukkan melalui tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Peningkatan ini didukung oleh upaya perbaikan standar pelayanan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

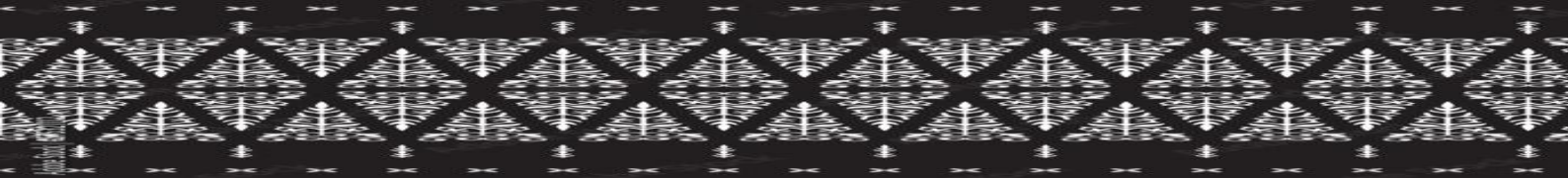
5. Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator: Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target

Target tahun 2025 sebesar 90%, dengan realisasi 85,74%, sehingga capaian kinerja sebesar 95,27%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengendalian administrasi pembangunan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

6. Sasaran: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Indikator: Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)



Target sebesar 79, dengan realisasi 81,9, sehingga capaian kinerja mencapai 103,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin baik dan transparan. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan semakin meningkatnya kualitas sistem pengadaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

7. Sasaran: Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

Indikator 7.1

Jumlah Pemekaran Kecamatan yang Difasilitasi

Target tahun 2025 sebanyak 2 kecamatan, dan realisasi juga 2 kecamatan sehingga capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi pemekaran wilayah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Indikator 7.2

Jumlah MoU antara Pemerintah Daerah dengan Mitra

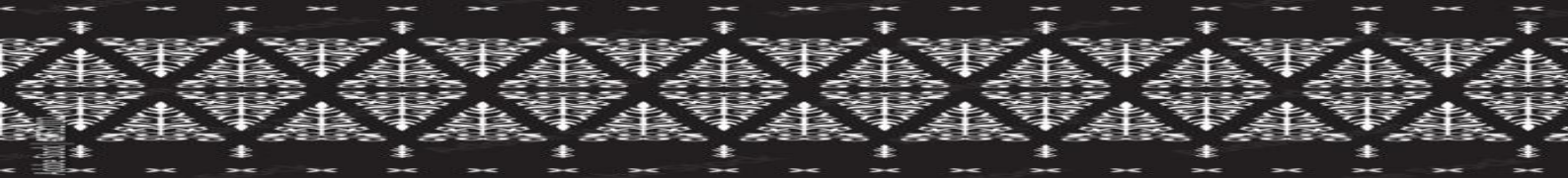
Target sebesar 20 dokumen, dengan realisasi 35 dokumen, sehingga capaian mencapai 175%. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD maupun lembaga non-pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

8. Sasaran: Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian

Indikator 8.1

Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia

Target sebesar 90%, dengan realisasi 78,04% sehingga capaian sebesar 86,71%. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan data informasi pembangunan bidang ekonomi belum sepenuhnya optimal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan integrasi data antar perangkat daerah.



Indikator 8.2

Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD

Target sebesar 90%, dengan realisasi 78,04% sehingga capaian sebesar 86,71%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD masih perlu ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja BUMD.

—

9. Sasaran: Mewujudkan Stabilitas, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama

Indikator: Peningkatan Peringkat MTQ

Target sebesar 90%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian mencapai 111,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kegiatan keagamaan serta koordinasi pelaksanaan MTQ berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan prestasi daerah.

Sasaran 10:

Berkembangnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator 10.1:

Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi sesuai ketentuan

Target: 3 PD

Realisasi: 3 PD

Capaian: 100%

Analisis

Capaian indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi sesuai ketentuan pada tahun pelaporan menunjukkan hasil 100%, dimana dari target 3 Perangkat Daerah, seluruhnya telah berhasil mengimplementasikan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam penataan kelembagaan perangkat daerah telah berjalan dengan baik. Implementasi struktur organisasi yang sesuai regulasi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola

pemerintahan, memperjelas fungsi dan tugas perangkat daerah, serta mendukung peningkatan kinerja birokrasi.

Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan tata kelola organisasi perangkat daerah semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

III.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 10 Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal periode sebelum Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 TW I s.d TW III dan pelaksanaan keberhasilan periode sesudah Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 yang telah disahkan pada bulan oktober dengan 1 sasaran strategis dengan 13 indikator pada TW IV.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

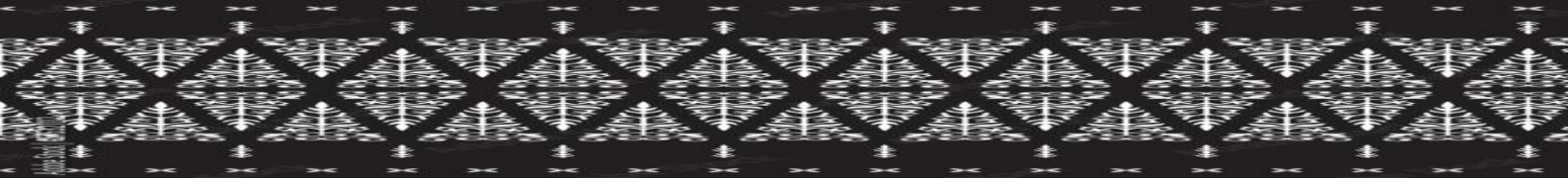
Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	3,2405	98,20

Cataan : Nilai LPPD Nilai terakhir tahun 2023

Capaian indikator kinerja dari sasaran sebelum perubahan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) adalah sebagai berikut :

1.1 Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Berdasarkan hasil evaluasi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 memperoleh skor sebesar 3,2405 dengan status kinerja Sedang. Nilai ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

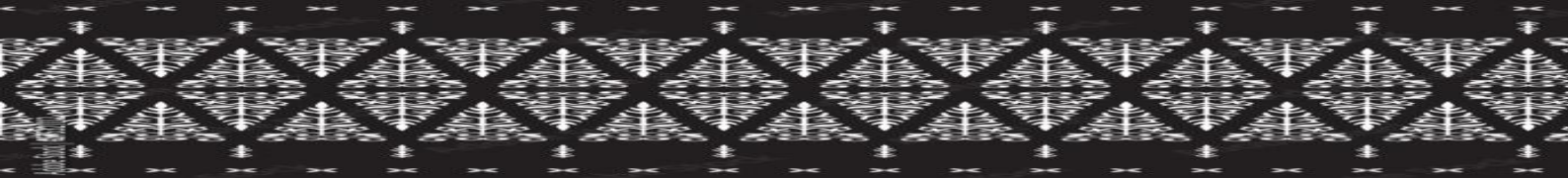


Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024. Capaian tersebut menjadi dasar (baseline) dalam pengukuran kinerja LPPD Tahun 2025, mengingat siklus penilaian LPPD dilakukan secara ex-post atau berdasarkan kinerja tahun sebelumnya. Dalam konteks perencanaan kinerja Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target Nilai LPPD sebesar 3 dengan kategori Sedang. Target ini disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, kesiapan perangkat daerah, serta dinamika regulasi dan kebijakan nasional terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan realisasi nilai sebesar 3,2405, capaian kinerja mencapai 98,20% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan kinerja.

Perlu dijelaskan bahwa untuk LPPD Tahun 2024, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 sampai dengan saat ini belum ditetapkan, karena masih dalam proses penilaian dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 belum tersedia nilai LPPD yang bersumber dari pelaksanaan kinerja Tahun 2024. Sebagai bagian dari upaya pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Penyusunan LPPD Tahun 2024 tersebut merupakan langkah strategis dan konkret dalam rangka memastikan kesinambungan siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun hingga saat ini hasil penilaian LPPD Tahun 2024 masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka memastikan kualitas substansi dan kesesuaian laporan dengan standar penilaian nasional, penyusunan LPPD Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2025 dilakukan dengan upaya maksimal, antara lain melalui pelaksanaan asistensi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, baik secara langsung maupun melalui mekanisme daring. Asistensi tersebut difokuskan pada pemenuhan indikator dan subindikator LPPD, kesesuaian data dukung, kejelasan narasi kinerja, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja seluruh perangkat daerah terutama pada pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi internal lintas perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan, guna memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam LPPD Tahun 2024 telah melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang.

Upaya yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 agar mencapai hasil yang ditargetkan yaitu sebagai berikut :

- 
1. Melaksanakan asistensi penyusunan yang intensif terkait dengan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dengan Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 2. Penguatan Koordinasi Antara Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyusunan.
 3. Komitmen pimpinan daerah dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 4. Peran aktif tim penyusun LPPD Provinsi dalam melakukan asistensi dan verifikasi data kepada perangkat daerah.
 5. Pengalaman dan pembelajaran dari penyusunan LPPD tahun-tahun sebelumnya yang meningkatkan ketepatan proses dan substansi laporan.

Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Lambatnya keluar hasil penilaian laporan pada tahun sebelumnya yang keluar sudah melewati batas waktu penyusunan.
2. Keterlambatan dalam penyampaian Pedoman Umum penyusunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
3. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam pengisian indikator LPPD sesuai pedoman terbaru.
4. Keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung dari perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan.
5. Perubahan regulasi dan kebijakan teknis dari pemerintah pusat yang memerlukan penyesuaian dalam waktu terbatas.

Indikator nilai LPPD dapat tercapai dengan adanya dukungan program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan maka akan terselenggaranya kegiatan ini melalui asistensi dengan Perangkat Daerah dengan narasumber dari KEMENDAGRI, rapat koordinasi serta studi tiru ke provinsi lain untuk membandingkan dan mempelajari mekanisme Laporan Pemerintah Daerah.

Efisiensi sumber daya merupakan faktor krusial dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Provinsi Sumatera Selatan. Efisiensi ini tidak hanya mencakup penggunaan anggaran tetapi juga optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana, terutama dalam mendukung proses penyusunan yang kompleks dan memerlukan data yang akurat. Berikut adalah faktor-faktor efisiensi sumber daya dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- **Optimalisasi SDM (Tim Penyusun):** Kemampuan dan kompetensi SDM di Bagian Tata Pemerintahan atau Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan sangat memengaruhi kualitas LPPD. Efisiensi dicapai ketika tim penyusun memiliki pemahaman yang baik atas regulasi, sehingga mampu mengolah data menjadi laporan yang memenuhi standar.
- **Efisiensi Anggaran Kegiatan:** Penyusunan LPPD memerlukan anggaran khusus (honorarium, rapat koordinasi tim teknis). Efisiensi anggaran berarti memaksimalkan realisasi fisik (penyelesaian laporan) dengan biaya yang terukur, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Setda.
- **Pemanfaatan Sistem Informasi (SILPPD):** Penggunaan teknologi informasi, seperti *Dashboard* Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), sangat menentukan kecepatan dan akurasi data, sehingga efisiensi waktu penyusunan tercapai.
- **Koordinasi Tim Teknis:** Komunikasi antar tim penyusun (rapat koordinasi dan komunikasi digital seperti WhatsApp Group) memengaruhi efektivitas penyusunan bab-bab dalam dokumen LPPD.
- **Ketepatan Waktu (Time Management):** Efisiensi penyusunan LPPD di Sumatera Selatan dinilai dari kemampuan menyelesaikan laporan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kemendagri).
Secara keseluruhan, efisiensi sumber daya pada penyusunan LPPD Sumsel berfokus pada **kemampuan SDM** dan **pemanfaatan teknologi** untuk menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi dengan input (anggaran/waktu) yang minimal namun efektif

Capaian indikator sesudah perubahan pada bulan oktober menjadi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target 3,3 (sedang) lebih tinggi dari target yang ditentukan sebelum perubahan dengan sasaran strategis **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien**. Nilai dari realisasi LPPD masih memakai nilai dari tahun 2023 seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya dengan capaian 95,31%. Masih belum mencapai nilai dari target, upaya kedepan Provinsi Sumatera Selatan bisa melebihi nilai yang telah ditentukan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Penataan Peraturan Perundang-undangan** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja					Capaian Tahun 2025			
					Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM				%	100	95,78	95,78

Capaian indikator kinerja dari sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

2.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 95,78%. Persentase produk hukum 95,78% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nilai Indeks Laporan RANHAM mencapai target, Jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik

Target Peraturan Daerah pada tahun 2025 ditargetkan 7 (tujuh) perda Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik. Kesemua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.idih.sumselprov.go.id.

Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik

Peraturan Gubernur pada Tahun 2025 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub. Kesemua Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.idih.sumselprov.go.id.

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase pelayanan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat diakses oleh publik. Adapun program yang mendukung adalah program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan dan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM dikarenakan adanya transparansi produk hukum dan penanganan hukum dari berbagai lapisan.

Capaian realisasi Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2025 sudah tercapai 100% semua produk hukum yang didata dan masuk melalui website dapat diakses publik, jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dibawah ini perbandingan beberapa tahun persentase produk hukum daerah, pengadaan perkara dan ham di Sekretariat Daerah di Biro Hukum Tahun 2025 bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH, PENANGANAN PERKARA DAN HAM
SEKRETARIAT BIRO HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kegiatan	Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum		Target Produk Hukum		Persentase
1	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum Pengaturan	raperda pergub	9 Perda 31 Pergub	60	20	0,3333	33,33%
2	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum Penetapan	SK Biro, Badan, Lemabaga SK Dinas	500 SK 515 SK	1015	700	0,6897	68,96%
3	Jumlah Pedokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	JDIH Himpunan	520 SDIH 69 Buku	589	84	0,1426	20,37%
4	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Fasilitasi dan Evaluasi	Raperda Kab.Ko Raperda Kab.Ko	48 Raperda 501 Raperkada	549	450	0,8197	81,96%
5	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Perkara	22 Kasus 51 Bankum	73	20	0,2740	34,16%
6	Jumlah Masalah dan NonLitigasi Yang diselesaikan	Laporan	3 Laporan	3	3	1	100%
					Jumlah		3,26%
					Rata-rata		0,5432
					Persentase Rata-rata		54,32%

**PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH, PENANGANAN PERKARA DAN HAM
SEKRETARIAT BIRO HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kegiatan	Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum		Target Produk Hukum		Persentase
1	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum Pengaturan	raperda pergub	9 Perda 31 Pergub	41	20	0,487804	48,78%
2	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum Penetapan	SK Biro, Badan, Lemabaga SK Dinas	500 SK 500 SK	1000	700	0,7	70%
3	Jumlah Pedokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	JDIH Himpunan	419 SDIH 121 Buku	540	110	0,203703	20,37%
4	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Fasilitasi dan Evaluasi	Raperda Kab.Ko Raperda Kab.Ko	60 Raperda 621 Raperkada	681	450	0,660792	66,07%
5	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Perkara	30 Kasus 52 Bankum	82	28	0,341463	34,16%
6	Jumlah Masalah dan NonLitigasi Yang diselesaikan	Perkara	3 Laporan	3	3	1	100%
						Jumlah	3,39%
						Rata-rata	0,1446016
						Persentase Rata-rata	14,46%

Persentase Perkara produk hukum pada tahun 2023 yaitu Peraturan Gubernur pada Tahun 2023 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub dan realisasinya adalah 37 (Tiga puluh tujuh) Pergub yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 137,03% dari target yang ditetapkan. Kesemua Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Untuk Peraturan Daerah tahun 2023 target sebanyak 7 (tujuh) realisasi 5 (lima), dari perbandingan beberapa tahun ini capaian rata-rata produk hukum peningkatan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu keberhasilan ini melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan seperti kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten /kota, dan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum

lainnya, kegiatan bantuan hukum seperti fasilitasi penyelesaian masalah hukum, fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM semua ini membantu proses terselenggaranya persentase produk hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dapat di akses melalui situs pelayanan produk hukum.

Pada triwulan ke IV terjadi perubahan Renstra 2025-2030 yang telah disahkan oktober 2025 sesuai RPJMD terbaru tahun 2025 s.d 2029 yaitu dengan Sasaran Strategis **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien** dengan 2 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	82	96,70	118,65
2.	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100

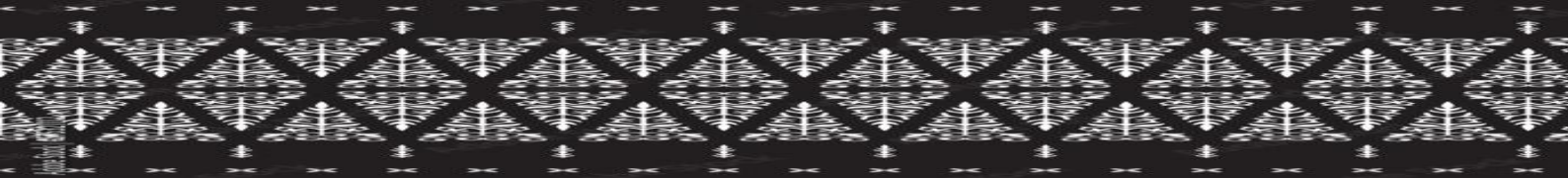
1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum yaitu capaian yang terkait dengan penilaian proses pembententuan peraturna perundang-undangan di daerah, penilaian terhadap perancang dan analis hukum di daerah dan jaringan dokumentasi informasi hukum. Tahun 2025 Indeks Reformasi Hukum ditargetkan sebesar angka 82 dengan realisasi angka sebesar 96,70 dengan nilai AA. Berdasarkan penilaian nasional yang digelar oleh Kementerian Hukum, mayoritas Kementerian/Lembaga pada tahun 2025 meraih predikat istimewa dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH). Penilaian ini mencakup identifikasi, pemetaan, dan deregulasi aturan untuk memperkuat sistem regulasi di Indonesia. Kemenkum Sumsel berperan aktif dalam penilaian ini.

Data spesifik indeks reformasi hukum Sumatera Selatan tahun 2025 belum tersedia saat ini, karena penilaian tersebut biasanya dirilis di akhir tahun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penilaian ini mencakup evaluasi regulasi, deregulasi, dan penguatan sistem hukum. Perbandingan tahun ke tahun (2024-2025) akan berfokus pada efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Faktor-faktor yang Akan Mempengaruhi Indeks Tahun 2025:

- **Transisi Kementerian:** Penyesuaian kelembagaan setelah pembagian Kemenkumham menjadi tiga kementerian baru di tahun 2025.
- **Peta Jalan (Road Map):** Fokus pada penyederhanaan peraturan dan penataan birokrasi, mengacu pada arah kebijakan nasional.
- **Evaluasi Regulasi:** Pemetaan peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi atau layanan publik.



Untuk mendapatkan angka perbandingan yang akurat, rilis resmi Indeks Reformasi Hukum oleh [BPK](#) atau Kemenkumham Sumsel pada akhir tahun 2025 perlu diacu.

Poin penting Indeks Reformasi Hukum 2025 Sumatera Selatan (Kontek Nasional) :

- **Peningkatan Kualitas:** Penilaian IRH 2025 berfokus pada penguatan sistem regulasi, deregulasi, dan re-regulasi aturan.
- **Hasil:** Mayoritas instansi, termasuk Kemenkum Sumsel, dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam reformasi hukum.
- **Tujuan:** Mengukur sejauh mana instansi melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem hukum yang ada, guna mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola yang lebih baik.

Sebagai informasi, penilaian ini adalah bagian dari komitmen untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi dan hukum di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Upaya dan faktor pendukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 di Sumatera Selatan difokuskan pada penguatan kualitas regulasi daerah, digitalisasi layanan hukum, dan peningkatan sinergi antarlembaga untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Kanwil Kemenkumham Sumsel aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk memaksimalkan capaian IRH di 17 Kabupaten/Kota pada tahun 2025.

Upaya Peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 Sumatera Selatan :

- **Sosialisasi dan Pendampingan Intensif:** Kanwil Kemenkumham Sumsel gencar menyosialisasikan pedoman penilaian IRH 2025 kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman teknis.
- **Optimalisasi Penataan Regulasi:** Melakukan identifikasi, pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan di tingkat daerah untuk menghindari tumpang tindih.
- **Penguatan Sekretariat IRH:** Pendampingan terhadap sekretariat IRH di daerah dalam pemenuhan data dukung (dokumen) agar penilaian lebih akurat dan objektif.
- **Digitalisasi Layanan Hukum:** Menerapkan layanan berbasis digital, seperti sistem administrasi badan hukum (SABH) dan pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah mencatat 558 koperasi disahkan per Juni 2025.
- **Inovasi Layanan "Jempol Hukum":** Mengimplementasikan program "Jemput Bola Layanan Hukum" untuk mempercepat akses layanan hukum dan kekayaan intelektual di masyarakat.
- **Penguatan Pengawasan Notaris:** Pelantikan Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MKNW) Sumsel 2025–2028 untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas layanan.

Faktor Pendukung Indeks Reformasi Hukum 2025 Sumsel:

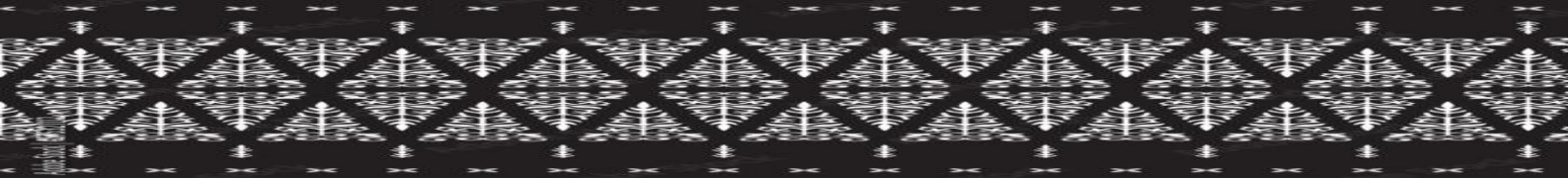
- **Komitmen Tinggi Pemerintah Daerah:** Adanya sinergi kuat antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Pemda (termasuk koordinasi khusus dengan Kabupaten PALI) dalam tindak lanjut hasil penilaian IRH.
- **Program Laksan-Sapa 2025:** Dukungan penuh terhadap program "Laksan-Sapa" yang mendorong UMKM Naik Kelas, yang meningkatkan relevansi reformasi hukum bagi ekonomi daerah.
- **Pengembangan Kompetensi ASN:** Peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum.
- **Sinergi Instansi Terkait:** Kolaborasi dengan akademisi, organisasi bantuan hukum, dan kementerian terkait untuk menyusun strategi kebijakan.
- **Implementasi Perpres No. 81/2010:** Menjadikan *grand design* reformasi birokrasi sebagai acuan utama dalam pengukuran reformasi hukum.

Upaya-upaya ini bertujuan memperbaiki nilai IRH yang sebelumnya baru dua daerah di Sumsel mencapai kategori baik, guna mendorong investasi dan pembangunan yang lebih baik di Sumatera Selatan.

Berdasarkan informasi capaian kinerja tahun 2025-2026, upaya peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Sumatera Selatan (Sumsel) difokuskan pada penguatan tata kelola regulasi, efisiensi sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi layanan. Kanwil Kemenkum Sumsel aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar sejalan dengan reformasi.

Berikut adalah poin-poin kunci terkait efisiensi sumber daya dan IRH di Sumatera Selatan pada 2025:

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Kanwil Kemenkum Sumsel menekankan pengembangan kompetensi fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum untuk memperbaiki kualitas dokumen IRH.
- **Sosialisasi dan Pendampingan IRH:** Sosialisasi Aplikasi IRH dan pemetaan kebutuhan fitur dilakukan secara intensif pada awal 2026 untuk mempermudah penilaian dan pengisian data, yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses evaluasi.
- **Digitalisasi Layanan (AHU):** Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), layanan di tingkat kanwil telah berbasis digital dengan tingkat penyelesaian permohonan mencapai 99,48 persen, menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi.
- **Fokus Efisiensi Anggaran & Kinerja:** Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target realisasi fisik dan program penunjang administrasi perkantoran



sebesar 100% pada tahun 2025, dengan menekankan penggunaan anggaran yang efisien (misalnya, untuk honorarium KPA/PPTK sesuai standar biaya).

- **Dampak pada Investasi:** IRH yang lebih baik diupayakan untuk mengurangi hambatan investasi di Sumsel, sejalan dengan peningkatan peran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, tahun 2025 ditandai dengan upaya intensif Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan nilai IRH melalui pemenuhan dokumen yang sistematis dan pengembangan kompetensi aparatur hukum, guna mendukung iklim investasi dan kepastian hukum yang lebih baik.

Program dan kegiatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 di Sumatera Selatan difokuskan pada penguatan kualitas regulasi daerah dan perlindungan hukum, yang disosialisasikan Kanwil Kemenkum Sumsel berdasarkan peraturan terbaru. Kegiatan utama mencakup sosialisasi penilaian IRH, peningkatan kualitas, konsistensi, dan dampak regulasi, serta program pendukung seperti "Jempol Hukum" (layanan kekayaan intelektual) dan pembentukan Posbankum.

Berikut rincian program dan kegiatan IRH 2025 di Sumatera Selatan:

- **Sosialisasi dan Penilaian IRH 2025:** Kegiatan teknis untuk mengukur reformasi hukum melalui identifikasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan di tingkat pemerintah daerah.
- **Program "Jempol Hukum" (Jemput Bola Layanan Hukum):** Inovasi Kanwil Kemenkum Sumsel untuk memberikan pelayanan hukum, khususnya kekayaan intelektual bagi UMKM, yang berlangsung pada September-Oktober 2025.
- **Penguatan Akses Keadilan:** Pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
- **Sinergi Tata Kelola Regulasi:** Fokus pada peningkatan kualitas, konsistensi, dan dampak nyata peraturan daerah terhadap masyarakat, bukan hanya kuantitas.
- **Pendampingan Tim Sekretariat Wilayah:** Memfasilitasi Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam pemenuhan dokumen IRH.

Tujuan utama dari rangkaian kegiatan ini adalah meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adil, dan efisien.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian aksi HAM pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dengan capaian 100%, hal ini disebabkan penilaian terhadap Rencana Aksi HAM Daerah tahun 2025 meliputi beberapa sasaran aksi diantaranya terkait dengan disabilitas, perempuan, anak, pendidikan inklusi serta bantuan social bagian penyandang disabilitas. Indikator ini baru ada pada Triwulan IV setelah perubahan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2030. Capaian Aksi HAM di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 15 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan sebagai Daerah Peduli HAM tahun 2024, sedangkan tahun 2025 masih tahap survey, naik dari hanya 3 daerah pada tahun 2022. Prestasi ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan komitmen tinggi dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berikut adalah beberapa detail terkait capaian Aksi HAM di Sumsel:

- **Penghargaan Peduli HAM:** Sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan berhasil meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2024.
- **Peningkatan Signifikan:** Capaian ini merupakan peningkatan yang drastis dibandingkan tahun 2022, di mana hanya 3 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan tersebut.
- **Penghargaan Pimpinan:** Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel menerima penghargaan sebagai pembina yang berhasil memotivasi setidaknya 60% kabupaten/kota di wilayahnya untuk menjadi Daerah Peduli HAM.
- **Fokus Pemenuhan HAM:** Kemenkumham Sumsel terus mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di daerah, termasuk dalam pelaporan Aksi HAM, Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam mendorong kesadaran dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan.

Faktor pendukung tingginya persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya berdasarkan laporan Kemenkumham Sumsel, didorong oleh partisipasi aktif dalam pelaporan, sinergi antarlembaga, dan komitmen pelayanan publik yang tinggi.

Berikut adalah faktor-faktor pendukung utama:

- **Tingginya Angka Partisipasi Pelaporan HAM:** Selama beberapa tahun terakhir, partisipasi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Sumatera Selatan dalam melaporkan Aksi HAM meningkat pesat, yang merupakan indikator utama keberhasilan.

- **Optimalisasi Kinerja Kemenkumham Sumsel:** Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel berperan aktif sebagai perpanjangan tangan pusat, dengan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 yang tinggi (80,89), mencerminkan manajemen yang efektif. Sementara tahun 2025 lagi proses.
- **Komitmen Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis HAM:** Adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, dan Kemenkumham untuk menerapkan prinsip HAM dalam kebijakan daerah, yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2021-2025.
- **Penyusunan Anggaran dan SDM yang Mendukung:** Kemenkumham Sumatera Selatan memastikan penyerapan anggaran belanja barang dan modal mencapai target (90%), yang mendukung sarana dan prasarana dalam pelayanan bidang HAM.
- **Fokus pada Kelompok Rentan:** Aksi HAM difokuskan pada pemenuhan hak kelompok sasaran seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
- **Penggunaan Teknologi dalam Layanan:** Optimalisasi teknologi informasi (seperti aplikasi SMART DJA dan sistem pelaporan lainnya) memudahkan pemantauan dan pencapaian target HAM.

Secara keseluruhan, komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/pemerintah kota) di Sumatera Selatan dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) adalah faktor pendukung paling krusial.

Berdasarkan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Selatan, berikut adalah informasi terkait efisiensi sumber daya dan capaian aksi HAM :

- **Capaian Pelaporan Aksi HAM:** Capaian pelaporan Aksi HAM di Sumatera Selatan dilaporkan membanggakan dan terus dioptimalkan, dengan fokus pada pelayanan hukum dan HAM.
- **Nilai Kinerja Anggaran (Efisiensi):** Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2024 di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel mencapai **80,89**. Nilai ini merupakan gabungan dari nilai aplikasi SMART DJA (50%) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (50%).
- **Target Penyerapan Anggaran:** Jajaran Kemenkumham Sumsel telah memenuhi target penyerapan anggaran, dengan rincian target **90%** untuk jenis belanja barang dan **90%** untuk jenis belanja modal.

- **Fokus Efisiensi:** Langkah efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk layanan hukum dan HAM serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Secara keseluruhan, Kanwil Kemenkumham Sumsel berupaya meningkatkan pemajuan HAM (menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM) bagi masyarakat dan aparatur, sejalan dengan peningkatan kualitas SDM dan efektivitas organisasi.

Program dan kegiatan Aksi HAM di Sumatera Selatan difokuskan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dengan capaian yang menunjukkan hasil membanggakan melalui pelaporan aksi HAM yang intensif. Kemenkumham Sumatera Selatan mengoptimalkan pelayanan publik dan pemajuan HAM. Kegiatan utamanya meliputi penguatan pelayanan publik, pemenuhan hak kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, adat), serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

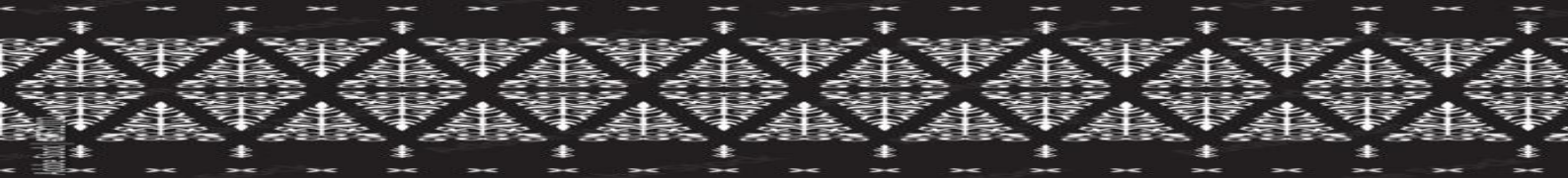
Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)	%	12	14,16	118,00
2.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	90	96,37	107,08

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas (maju pembangunan yang transparan dan akuntabel) adalah sebagai berikut :

2.1 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)

SAKIP Sekretariat Daerah berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJiP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.

- 
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
 5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
 6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 Nilai SAKIP (komponen pelaporan) Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 12% dengan realisasi sebesar 14,16 atau 118%, peningkatan nilai SAKIP komponen pelaporan meningkat tidak lepas dari dukungan dari biro-biro dalam hal pengumpulan data, serta asistensi yang dilakukan untuk mendongkrak nilai SAKIP Sekda. Penilaian tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III untuk melihat tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah hampir sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik, capaian penyerapan kinerja program dan kegiatan yang menunjang kinerja dari semua indikator kinerja dan sasaran tepat guna.

Nilai SAKIP sisi Pelaporan mengalami peningkatan dari tahun 2023 s.d 2025. Nilai Sisi Pelaporan yang meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dan memperbaiki laporan kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Dokumen Laporan Kinerja LKJIP belum direviu secara internal.
2. Laporan Kinerja telah disusun, namun informasi yang disajikan belum menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan budaya kinerja langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menyusun dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala (terus menerus dengan interval waktu yang relatif sama) yang dituangkan dalam Rencana Aksi atas kinerja.
2. Melakukan pengukuran kinerja yang disesuaikan dokumen dengan aktivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai.
4. Melakukan revidi atas Laporan Kinerja LKjIP secara internal.
5. Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja agar menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai.
6. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025.
7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

Kendala lain yang dihadapi dilingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan LKjIP yaitu kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi sehingga sering memperhambat proses pengumpulan data kebagian organisasi. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki pada masing-masing Biro. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang LKjIP terutama oleh pelaksana teknis selaku penyusun LKjIP juga sangat berpengaruh pada penyusunan dan pengumpulan data karena sering berganti pelaksana teknis yang mengerjakan laporan dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan adanya pemahaman, data pendukung dari masing-masing Biro serta memiliki kompetensi dibidangnya maka penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas dapat tercapai. Diharapkan Tahun 2025 Sekeretaryat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja nilai SAKIP.

Upaya – upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2025 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Biro untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
3. Komitmen dan Ownership SAKIP, dari lebel pimpinan hingga ke level staf.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, penjelasan capaian kinerja secara komprehensif dan pemanfaatannya dalam pengambil kebijakan.
5. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. *Optimalisasi system* manajemen kinerja melalui dukungan teknologi (TIK).

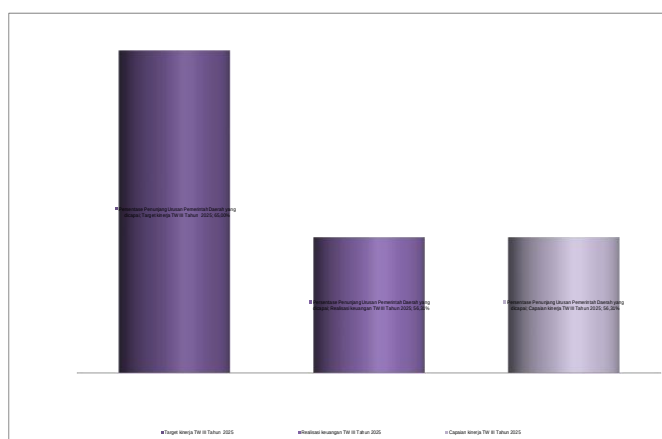
Capaian Nilai SAKIP dari sisi komponen nilai dapat dicapai dengan adanya dukungan program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring evaluasi SAKIP serta kegiatan bimbingan teknis dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada triwulan IV ada perubahan nilai Target dari SAKIP berdasarkan Renstra terbaru 2025-2030 yang telah disahkan pada bulan oktober yaitu nilai SAKIP BB (78) dengan realisasi 88,79 sebesar 113,83. Nilai SAKIP mengalami peningkatan Signifikan, hal ini

disebabkan adanya dukungan dan kerja sama tim dalam penyelesaian Laporan Kinerja serta laporan pendukung lainnya.

2.2 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di capai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian Sampai Triwulan Tiga Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Terpenuhinya Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase Pelayanan Kehumasan yang Dilaksanakan	%	100 %	56,31 %
		Persentase Pelayanan Keprotokolan yang Dilaksanakan	%	100 %	



Sasaran Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 Triwulan Ketiga ditargetkan/ sasaran capaian kinerja 65%, realisasi keuangan 56,31% dan tingkat capaian kinerja 56,31%. Biro Humas dan Protokol Sekretariat

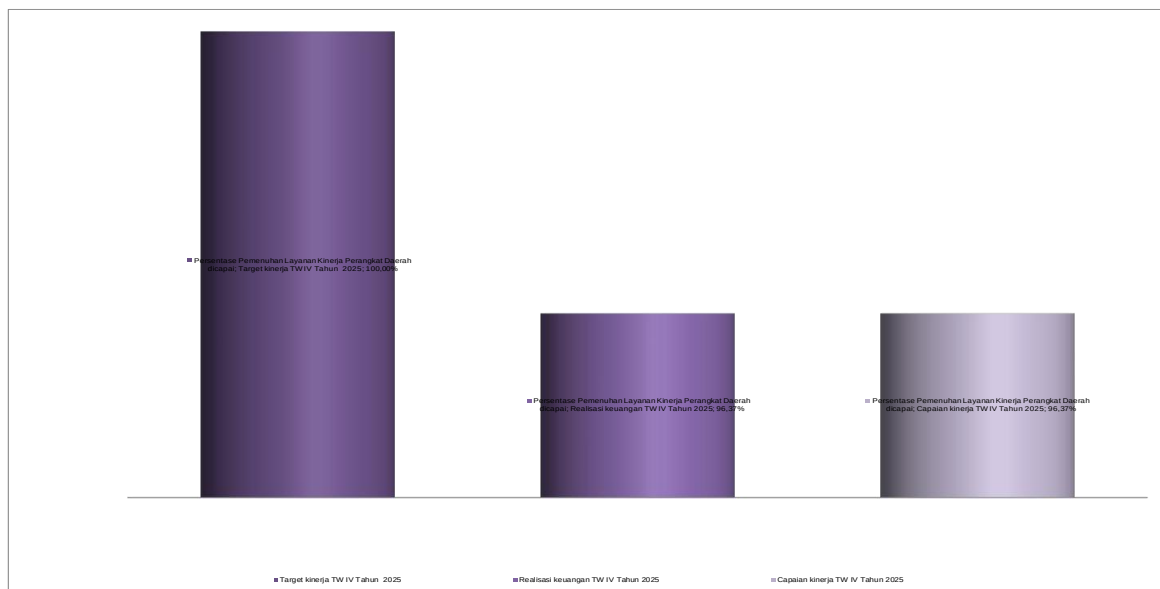
Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.

Pada Triwulan Keempat sesuai dengan Renstra 2025 – 2030 Biro Humas dan Protokol Mengalami Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja sesuai dengan RPJMD 2025–2029 dan INMEN 2 TAHUN 2025-1 sebagai berikut :

Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
--------------------------------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	CapaianTriwulan IV Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Layanan KDH/WKDH	Persentase Kualitas layanan KDH/WKDH yang terpenuhi	%	100 %	96,37 %

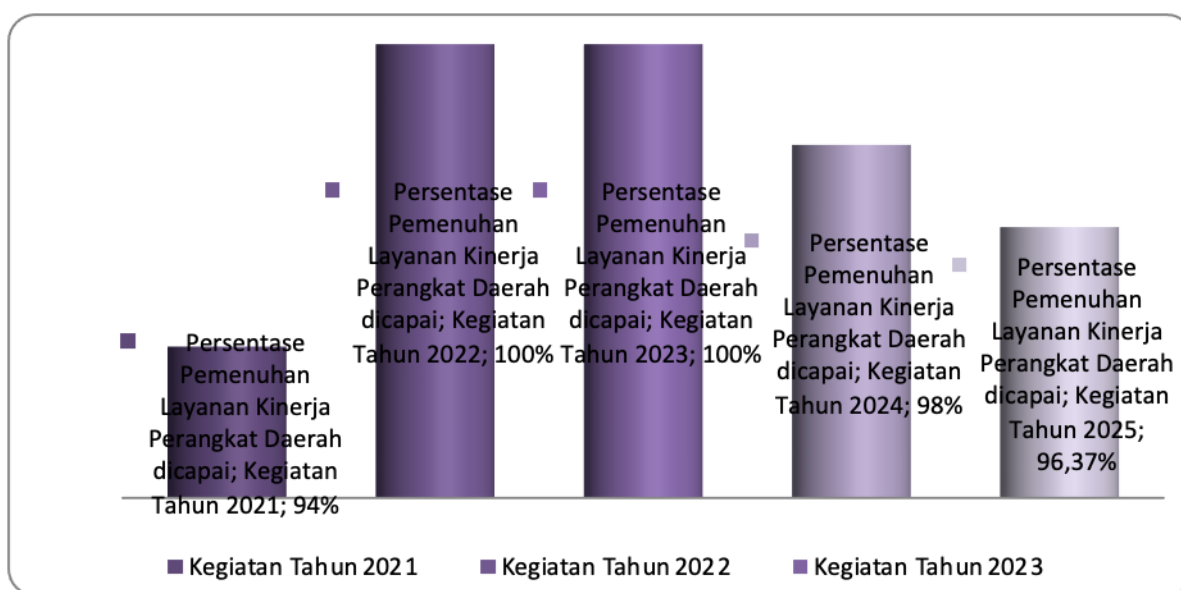


Sasaran Persentase Kualitas layanan KDH/WKDH yang terpenuh yang dicapai Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 Triwulan Keempat ditargetkan/ sasaran capaian kinerja 100%, realisasi keuangan 96,37% dan tingkat capaian kinerja 96,37%. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Fungsi Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Yang dicapai.

Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Layanan KDH/WKDH	Persentase Kualitas layanan KDH/WKDH yang terpenuhi	%	100	96,37	96,37	100	96,37

TahunKegiatan		PerbandinganCapaianTahun			
		Satuan	Target	RealisasiKeuangan	RealisasiFisik
1	KegiatanTahun 2021	%	100	94	94
2	KegiatanTahun 2022	%	100	94	100
3	KegiatanTahun 2023	%	100	90	100
4	KegiatanTahun 2024	%	100	98	98
5	KegiatanTahun 2025	%	100	96,37	96,37



Perbandingan Sasaran nilai Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Daerah dicapai adalah sebagai berikut :

- Tahun 2021 dengan sasaran/target 94%, realisasi 94% dan tingkat capaian 94% mengalami penurunan sebesar 6% hal ini dikarenakan banyak kegiatan di tahun 2021 tidak terserap 100%. kegiatan di tahun 2021 mengalami kendala dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan penyerapan indikator kinerja yang kurang optimal.
- Tahun 2022 dengan sasaran/target 100%, realisasi sebesar 94% dan tingkat capaian 100% keberhasilan nilai Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Publikasi pembuatan majalah yang berisi tentang kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Rakor Keprotokolan.

- Tahun 2023 dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 90% dan tingkat capaian kinerja 100%. keberhasilan nilai Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan yang berisi Buku Pidato, Buku Rilis, Buku Bank Data kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Publikasi kegiatan KDH/WKDH baik lewat media cetak maupun online dan Rakor Keprotokolan.
- Tahun 2024 dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 98% dan tingkat capaian kinerja 98%. keberhasilan nilai Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan yang berisi Buku Pidato, Buku Rilis, Buku Bank Data kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
- Tahun 2025 Triwulan Keempat dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 96,37% dan tingkat capaian kinerja 96,37%. keberhasilan nilai Persentase Kualitas layanan KDH/WKDH yang terpenuhi didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dan Fasilitas Keprotokolan. salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Publikasi kegiatan KDH/WKDH baik lewat media cetak maupun online, Penyiapan Materi Pimpinan yang berisi Buku Pidato, Buku Rilis, Buku Bank Data kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, dan Bimbingan Teknis Hubungan Keprotokolan.

Publikasi Pimpinan Kegiatan KDH/WKDH				
No	Hari / Tanggal	Polisi	Kegiatan	Publikasi
1	Senin, 05 Januari 2026		Asas sambutan	
2	Senin, 05 Januari 2026		Asistensi hukum	
3	Senin, 05 Januari 2026		Asistensi hukum	





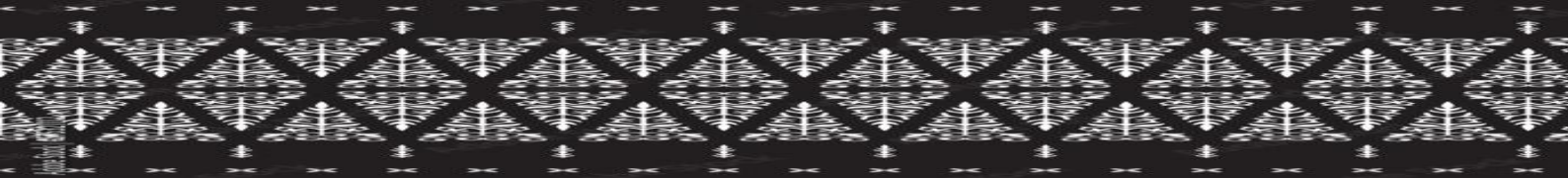
Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat paling bawah sampai atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu menyusun Renja Biro Humas dan Protokol semua indikator kegiatan disesuaikan dengan cascading Biro Humas dan Protokol;
3. Kinerja Biro Humas dan Protokol disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra dengan demikian pimpinan Kepala Biro harus komitmen dengan penyusunan Renja capaian dengan cascading;
4. Menambah Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,30 (A)	91,81	100,50



Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan publik berkualitas (maju pelayanan publik berkualitas) adalah sebagai berikut :

4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata “Baik” (62,51 – 81,25), untuk itu Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan mendapatkan nilai rata-rata “Sangat Baik” (91,81). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata “Sangat Baik” yaitu 91,81 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 91,81 hal ini disebabkan adanya kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan proses pengumpulan data sesuai tenggang waktu yang dijadwalkan. Adanya program yang mendukung pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan HAM;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Humas dan Protokol;
9. Biro Umum dan Perlengkapan.

Permasalahan dalam mengumpulkan data Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Masih diperlukan kerjasama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan lembaga lain seperti Akademisi dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Tindak lanjut nilai terendah dari 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang disediakan setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus segera untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah.

4. Masih diperlukan survei berbasis elektronik kepada Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik.

Harapan kedepan ditahun 2025 Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan dan mengupdate standar pelayanan publik.
2. Melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OMBUDSMAN RI dan Akademisi untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Diterapkan Survey Kepuasan Masyarakat berbasis elektronik disetiap unit pelayanan publik yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan target	%	90	85,74	95,27

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

5.1 Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2025 ditargetkan 90% terealisasi 85,74%. Indikator kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian kinerja secara fisik dan capaian kinerja secara keuangan sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Secara Fisik

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	90	85,74	92,67

Tabel Capaian Kinerja Secara Keuangan

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	90	85,74	92,67

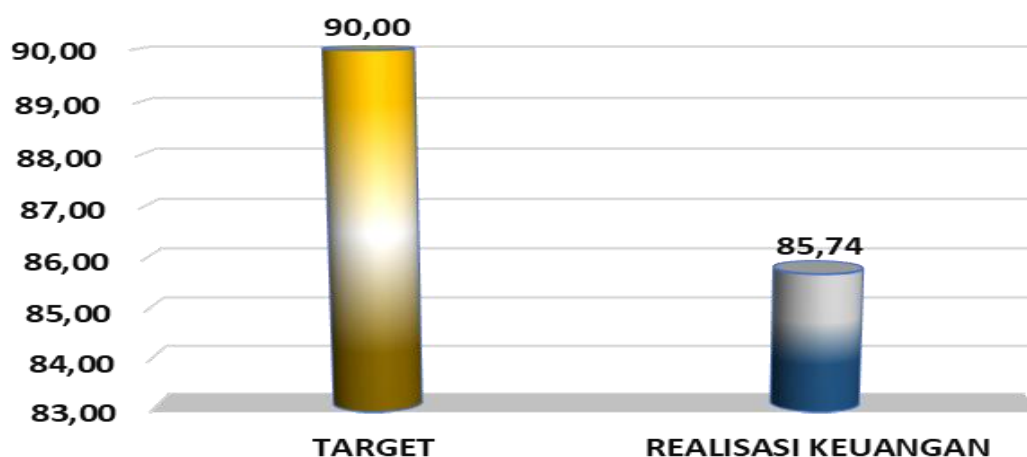
Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Secara Kinerja

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	90	85,74	95,27

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan pada Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2025 ditargetkan 90%, terealisasi keuangan 85,74%, dan fisik 92,67% atau realisasi sebesar 90% pada Biro Administrasi Pembangunan.

Grafik Persentase Penyerapan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Target dan Rencana Tahun 2025



Tabel Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target.	%	90,00	85,74	85,74	100,00	85,74

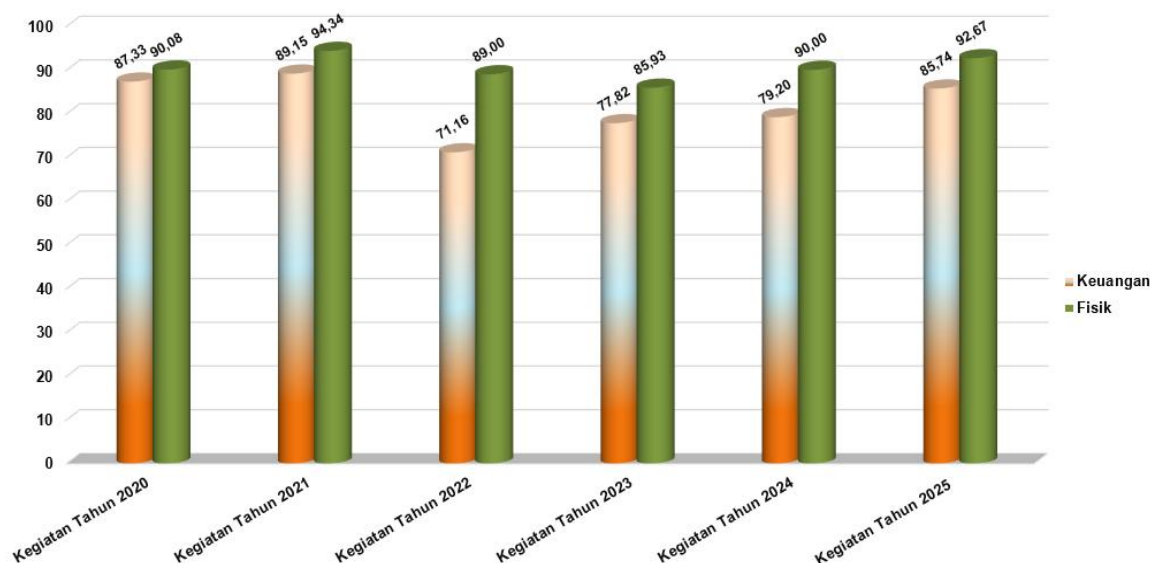
Berdasarkan tabel Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan diatas dapat dilihat indikator kinerja telah memenuhi target 90% dan realisasi 85.74% pada tahun 2025.

Tabel. Perbandingan Capaian Kegiatan Tahun 2020 - Tahun 2025

Tahun Kegiatan		Perbandingan Capaian Kegiatan Tahun 2020 - Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Kegiatan Tahun 2020	%	100	87,33	90,08
2	Kegiatan Tahun 2021	%	100	89,15	94,34
3	Kegiatan Tahun 2022	%	100	71,16	89,00
4	Kegiatan Tahun 2023	%	100	77,82	85,93
5	Kegiatan Tahun 2024	%	100	79,20	90,00
6	Kegiatan Tahun 2025	%	100	85,74	92,67

Dari tabel diatas dapat dilihat Perbandingan Capaian Kegiatan dari Tahun 2020 - Tahun 2025 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program / kegiatan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Biro Administrasi Pembangunan.

Grafik Perbandingan Capaian Kegiatan Tahun 2020 – Tahun 2025



Dari diagram diatas persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana dari tahun 2022 s.d tahun 2024 mengalami Penurunan Penyerapannya, pada tahun 2025 mengalami peningkatan dikarenakan ada program-program yang dapat terlaksana dengan maksimal.

Capaian indikator Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun kemarin, Peningkatan tersebut dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas monitoring dan evaluasi terkait Program / Kegiatan baik reguler maupun Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu program kebijakan administrasi pembangunan dengan Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pada bulan Oktober Tahun 2025 di Triwulan III untuk Perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan yang berisikan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenagn serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja di setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel.Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Fisik
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai peraturan.	Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai rencana dan target.	90%	92,67

Sedangkan Perjanjian Kinerja untuk Triwulan IV di Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Fisik
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	82%	92,67

Berdasarkan capaian target dan fisik pada Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah Sebesar 92,67%, selanjutnya melalui laporan ini dapat memberikan informasi atau gambaran mengenai indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

Pada Triwulan IV ada perubahan Renstra yang telah disahkan pada bulan Oktober indikator berubah menjadi **Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan** yaitu :

Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatea Selatan di Triwulan III sebesar Rp. 1.350.244.389,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) anggaran dengan mencakup 2 (Dua) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Tabel. Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	1.350.244.389,-	640.374.999,-	47,43

Pada Triwulan IV Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 1.810.627.269,- (Satu milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang mencakup 2 (Dua) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Tabel Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	1.810.627.269,-	1.552.384.089,-	85,74

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

- Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

II. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah .
- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.

Tahun 2025, untuk program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan persentase penyerapan Realisasi Keuangan sebesar 85,74% dan Realisasi Fisik sebesar 92,67%.

Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran sebesar Rp. 1.810.627.269,- (Satu milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan Realisasi Keuangan pada sebesar Rp. 1.552.384.089,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dengan Realisasi Keuangan (85,74%) dan untuk Realisasi Fisik mencapai (92,67%), bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Akuntabilitas Keuangan Perubahan

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	1.810.627.269,-	1.552.384.089,-	85,74

(BULAN DESEMBER 2025)

Analisis Efisiensi

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari lima belas sasaran, terdapat enam sasaran yang capaian kerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabe Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Capaian Keuangan	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	100,00	85,74	14,26

Efisiensi anggaran di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Harapan kedepan untuk meningkatkan persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Meningkatkan hasil pelaporan OPD dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatkan sinergi pembangunan antar daerah kabupaten/kota, pembangunan antar sektor;
3. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan kabupaten/kota dan pembangunan antar sektor lainnya secara administratif.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	79	81,90	103,67

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

6.1 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP). Nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) adalah skor predikat yang menilai kinerja pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, diukur dari pemanfaatan sistem, kompetensi SDM, dan kematangan UKPBJ, dengan skala predikat **Istimewa (100)**, **Sangat Baik (>90)**, **Baik (70-90)**, **Cukup (50-70)**, dan **Kurang (<50)**, bertujuan mendorong efisiensi dan transparansi pengadaan sesuai pedoman LKPP.

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (Nilai ITKP)	Realisasi 2025 (Nilai ITKP)
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	79 (Baik)	81.19 (Baik) SIRUP : 10.00 E-tendering: 5.00 E-Katalog : 0.00 Non Tendering : 0.00 Toko Daring : 1.00 E-Kontrak : 3.90 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan : 19.90 Indikator Kualifikasi dan Kompetensi PBJ : 21.29 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ : 40.00
Ada Perubahan target nilai pada TW IV dengan perubahan Renstra 2025-2030, namun tidak merubah nama indikator yang digunakan			
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	72 (Baik)	81.19 (Baik) SIRUP : 10.00 E-tendering: 5.00 E-Katalog : 0.00 Non Tendering : 0.00 Toko Daring : 1.00 E-Kontrak : 3.90 Indikator Pemanfaatan Sistem

			Pengadaan : 19.90 Indikator Kualifikasi dan Kompetensi PBJ : 21.29 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ : 40.00
--	--	--	--

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal **Baik** terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - 1.1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >> **bobot 10%.**
 - 1.2. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >> **bobot 5%.**
 - 1.3. e-Purchasing (Toko Daring) >> **bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1%.**
 - 1.4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing >> **bobot 5%.**
 - 1.5. e-Kontrak >> **bobot 5%.**
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) >> **bobot 30%.**
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) >> **bobot 40%.**

Pada tahun 2025 penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yaitu sebesar 81.19 dengan predikat **Baik**. Sehingga untuk tahun 2025 realisasi melebihi target yaitu 72, dengan penjelasan sebagai berikut :

-	SIRUP	: 10.00
-	E-Katalog	: 0.00
-	Non e Tendering/Non Purchasing	: 0.00
-	E-Tendering	: 5.00
-	Toko Daring	: 1.00
-	E-Kontrak	: 3.90
-	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	: 21.29
-	Tingkat Kematangan UKPBJ	: 40.00
-	Tingkat Kematangan UKPBJ	: 40.00

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya

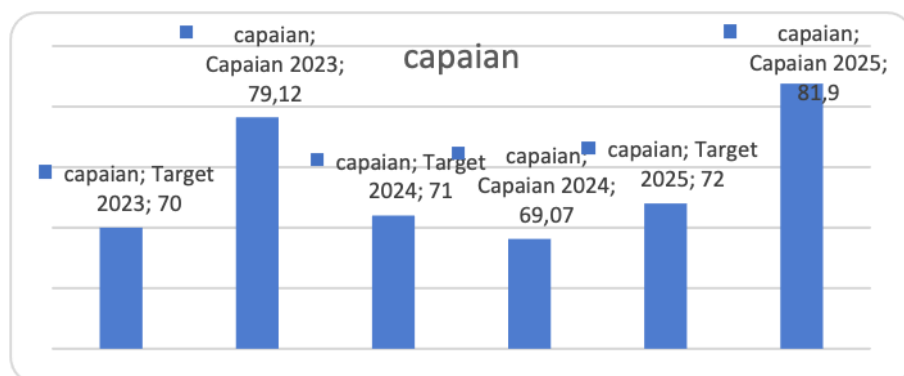
No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (Nilai ITKP)	Realisasi 2024 (Nilai ITKP)
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	71 (Baik)	69.07 (Cukup) SIRUP : 6.10 E-tendering: 5.00 E-Katalog : 0.00 Non Tendering : 0.00 E-Kontrak : 3.90 Kualifikasi dan Kompetensi PBJ : 13.07 Tingkat Kematangan UKPBJ : 40.00

Pada tahun 2024 nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah 69.07 dengan predikat **Cukup**, dimana tidak mencapai target yang ditentukan yaitu 71, hal ini dikarenakan adanya penurunan pada indikator Kualifikasi dan Kompetensi PBJ yang semula bernilai 18.00 menjadi 13.07 dikarenakan adanya perubahan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa semula 45 orang menjadi 62 orang, sedangkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yaitu sebesar 79,12 dengan predikat **Baik**.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- SIRUP : 6.23
- E-Purchasing : 0.00
- Non e Tendering/Non Purchasing : 5.00
- E-Tendering : 4.90
- Toko Daring : 1.00
- E-Kontrak : 3.99
- Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ : 18.00
- Tingkat Kematangan UKPBJ : 40.00

Gambaran capaian Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yaitu sebesar 79,12 dengan predikat **Baik**, Adapun untuk penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 capaiannya mengalami penurunan yaitu sebesar 69,07, serta peningkatan ITKP pada tahun 2025 sebesar 81,9.

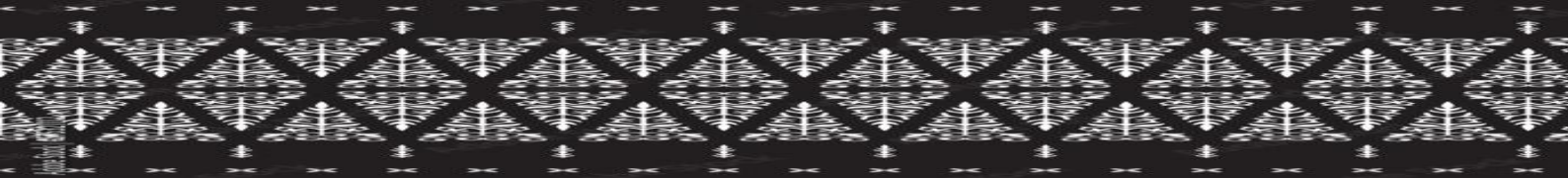
Harapan kedepan agar persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa terus meningkat maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencegah dan memberantas korupsi dengan integrase terpusat kebijakan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan;
3. Mengembangkan kompetensi poka dan aparatur penunjang proses pengadaan barang dan jasa;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai hasil akhir yang jelas;
6. Perlu adanya evaluasi yang terintegrasi dari ULP, Pokja Pemilihan, LPSE, PPK, pihak penyedia dan penggunaan LPSE kedepan bisa dilakukan secara full online, serta meningkatkan pengawasan tahapan tender;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa perlu didesain ulang, yaitu tahapan tender yang memerlukan interaksi secara tatap muka antara pokja dan penyedia, karena rawan intervensi.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berupa pemberian honorarium pokja pemilihan yang telah melaksanakan tender/pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai paket yang telah ditetapkan dan honorarium LPSE secara bulanan untuk proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan diadakannya Sosialisasi e-katalog lokal melalui Program Bela Pengadaan untuk OPD dan para pelaku usaha di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Diadakannya Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diikuti oleh seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan, tujuan



diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana/alat penunjang dan menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi pengadaan barang/jasa.

2. Diadakannya Bimtek Pejabat Pengadaan untuk Meningkatkan Kompetensi SDM para Pejabat Pengadaan dilingkungan Pemprov. Sumsel dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Diadakannya Sosialisasi Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Lingkungan Pemprov.Sumsel dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman keilmuan terkait hukum persaingan usaha dan pemahaman terkait mekanisme pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum persaingan usaha.
 4. Diadakannya Workshop Persaingan Usaha dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan bagi KPA, PPK dan PPTK yang bertujuan untuk peningkatan SDM di bidang persaingan usaha dan mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai wadah pembinaan kepada SDM pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Diadakannya Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawai dalam pengadaaan barang/jasa.
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1. Diadakannya Workshop Peningkatan Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah/forum dalam penyampaian peraturan/kebijakan dan informasi terkait peningkatan kematangan UKPBJ.
 2. Diadakannya Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan TKDN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM pengadaan Barang/jasa di bidang tata cara perhitungan TKDN.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan) Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini bernilai **Baik** dengan yaitu Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 81.19 dengan kinerja anggaran sebesar Rp.6.216.833.332,00 atau sebesar 92,34%.

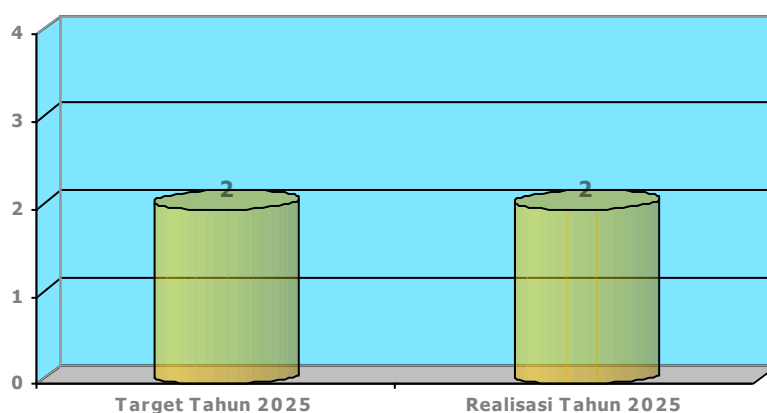
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Selatan melalui tugas dan fungsinya pada Tahun 2025 telah berhasil mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa dengan prinsip *value for money*.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi	Kecamatan	2	2	100
2.	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen MoU	20	35	175

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah sebagai berikut :

7.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi



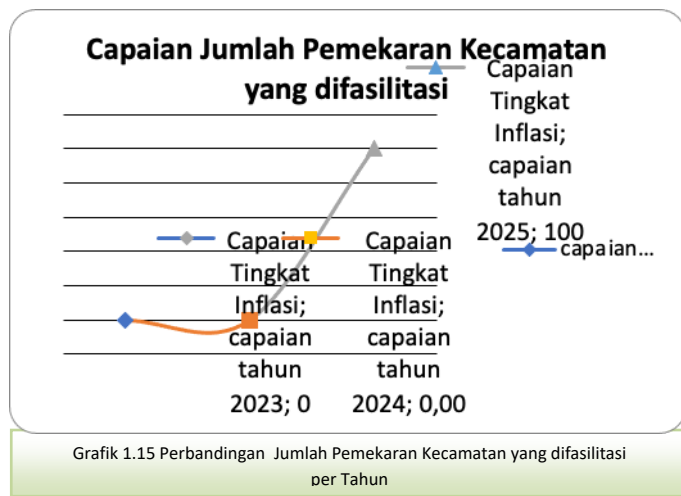
Grafik Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi Tahun 2025

Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan 2 kecamatan dan terealisasi 2 (dua) Kecamatan. Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan

sebanyak 2 (dua) kecamatan, telah masuk sebanyak 2 (dua) usulan

yaitu rencana pemekaran Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji Makmur menjadi Kecamatan Cahya Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan usulan pembentukan Pemekaran Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, namun untuk yang difasilitasi hanya 1 (satu) kecamatan yaitu usulan pembentukan Pemekaran Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Tim sudah melakukan peninjauan lapangan akan tetapi usulan pemekaran kecamatan yang diusulkan ke Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Untuk rencana pemekaran Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji Makmur menjadi Kecamatan Cahya Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ilir di Tahun 2025 baru melakukan koordinasi kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan belum difasilitasi lebih lanjut.



Capaian indikator jumlah pemekaran kecamatan yang difasilitasi bila dilihat dari grafik disamping tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan ditahun 2025.

Pemekaran Kecamatan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kecamatan, terealisasi sebanyak 0 (nol) kecamatan. Tahun

2023 ditargetkan 3 (tiga) kecamatan yang difasilitasi, tetapi karena tidak ada usulan pembentukan kecamatan dari Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada yang difasilitasi.

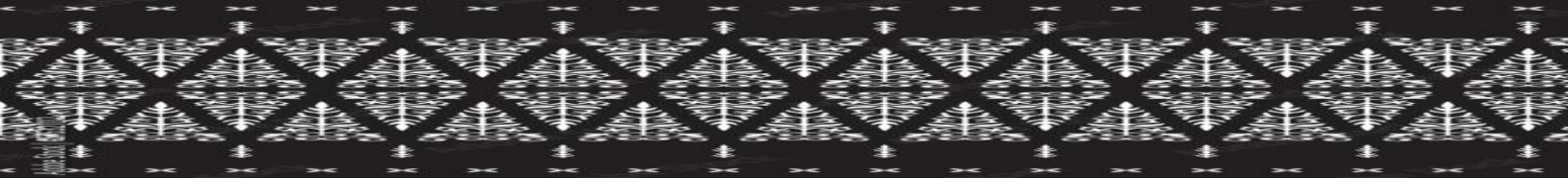
Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi pada tahun 2024 ditargetkan 2 kecamatan Usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) usulan pemekaran kecamatan yaitu dari Kabupaten Musi Banyuasin; Kecamatan Lalan akan dimekarkan menjadi 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Induk (Kecamatan Lalan) dan Kecamatan Pemekaran (kecamatan Karang Agung Jaya. Kegiatan pemekaran ini baru sebatas usulan, belum proses Rekomendasi karena dokumen usulan pemekaran tersebut masih perlu perbaikan dan penyempurnaan ke MENDAGRI.

Proses usulan pemekaran ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemekaran tersebut yaitu :

1. Masih berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.100.1-1/8000/SJ Tanggal 9 November 2022 tentang Moratorium Pemberian Dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa; hingga saat ini belum dicabut.
2. Masih belum lengkapnya data persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan persyaratan dasar kecamatan pemekaran tersebut, sehubungan dengan itu usulan masih dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan jumlah pemekaran kecamatan yang difasilitasi pada 2025 ditargetkan 2 kecamatan dengan realisasi 2 tapi salah satu pengusulan masih tahan koordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan belum difasilitasi lebih lanjut.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi didukung dengan adanya usulan pemekaran dari Kepala Daerah dan mudahnya proses pengajuan kelengkapan persyaratan



pemekaran kecamatan yang difasilitasi. Indikator ini didukung adanya program pemerintahan dan otonomi daerah. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan fasilitasi penataan wilayah. Diharapkan kedepannya bisa mencapai target yang telah ditentukan dengan adanya usulan baru dan disetujui dari MENDAGRI.

7.2 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah

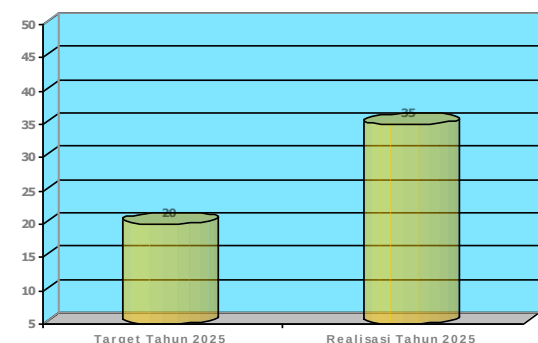
Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kemitraan pembangunan lintas sektor. Kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Lembaga Non Pemerintah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Selanjutnya, dilakukan tahap koordinasi dan konsultasi awal dengan calon mitra kerja sama. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, pertemuan bilateral, maupun komunikasi formal antarinstansi. Dalam tahap ini, masing-masing pihak menyampaikan maksud dan tujuan kerja sama, ruang lingkup kegiatan, bentuk kontribusi, serta manfaat yang diharapkan. Pemerintah Provinsi berperan aktif sebagai fasilitator untuk menyelaraskan kepentingan para pihak agar kerja sama yang dirumuskan bersifat saling menguntungkan dan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap berikutnya adalah penyusunan konsep dan substansi MoU, yang dilakukan secara cermat dan terstruktur. Penyusunan dokumen MoU mencakup perumusan latar belakang kerja sama, maksud dan tujuan, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu kerja sama, pembiayaan, serta ketentuan penutup. Dalam proses ini, Pemerintah Provinsi melibatkan perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang urusan yang dikerjasamakan, serta berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi hukum dan kerja sama untuk memastikan bahwa substansi MoU telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Setelah seluruh substansi MoU disepakati, kegiatan dilanjutkan dengan tahap finalisasi dan penandatanganan MoU. Penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku. Kegiatan penandatanganan MoU dilaksanakan secara resmi dan terdokumentasi dengan

baik, baik melalui kegiatan seremonial maupun melalui mekanisme administratif lainnya, sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati.



Grafik Jumlah MoU Tahun 2025

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) MoU terealisasi sebesar 35 (tiga puluh lima) MoU hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan MoU berjalan dengan baik dengan melibatkan

berbagai aspek di dalam penandatanganan MoU.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 26 (dua puluh enam) dokumen terealisasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Naskah Kerja Sama	Nomor Kerja Sama	Masa Berlaku		Jangka Waktu	Tentang	Instansi	Kontak
			Berlaku	Berakhir				
1	Kesepakatan Bersama	002/KSB/OTDA/I/2025	08 Januari 2025	08 Januari 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Yayasan Relung Indonesia tentang Pengelolaan Dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II di Sumatera Selatan	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Arianti (0821757 79283)

2	Perjanjian Kerja Sama	002/PKS/BAPEDDA/I/2025	19 Februari 2025	19 Februari 2028	3 tahun	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Yayasan Relung Indonesia) tentang Pemanfaatan Dana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Yelivva Azhar (0821843 24033)
3	Perjanjian Kerja Sama	003/PKS/DISHUT/I/2025	19 Januari 2025	19 Januari 2028	3 Tahun	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Yayasan Relung Indonesia) tentang Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 di Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Ahmad Zainhari (0813162 37809)
4	Perjanjian Kerja Sama	004/PKS/OLHP/I/2025	19 Januari 2025	19 Januari 2028	3 Tahun	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	

						Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Yayasan Relung Indonesia) tentang Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 di Sumatera Selatan		
5	Kesepakatan Bersama	003/KSB/OTDA/I/2025	13 Januari 2025	13 Januari 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Belitang Panen Raya tentang Implementasi Letak Sawah dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Lahan Sawah Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan	
6	Kesepakatan Bersama	006/KSB/OTDA/I/2025	22 April 2025	31 Desember 2025	1 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	

						Selatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya tentang Pemberian Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		
7	Kesepakatan Bersama	007/KSB/OTDA/I/2025	23 April 2025	23 April 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perusahaan Umum BULOG Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pembelian dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Perusahaan Umum BULOG	
8	Kesepakatan Bersama	008/KSB/OTDA/I/2025	24 April 2025	24 April 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Universitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Pengabdian kepada Masyarakat	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	

9	Kesepakatan Bersama	009/KSB/OTDA/I/2024	25 April 2025	31 Desember 2025	1 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	
10	Nota Kesepakatan	010/NK/OTDA/I/2025	15 Mei 2025	15 Mei 2030	5 tahun	Nota Kesepakatan Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergi dan kerja sama dalam kegiatan Program Makan Bergizi Gratis.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sandra Afrizal
11	Kesepakatan Bersama	011/KSB/OTDA/I/2025	20 Mei 2025	20 Mei 2027	2 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintahan Kabupaten Lahat dan PT. Bukit Asam, TBK dan PT. Royaltama Mulia Kencana dan PT. Servo	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	

						Lintas Raya tentang percepatan Pembangunan Jalan Khusus Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan		
12	Kesepakatan Bersama	012/KSB/OTDA/I/2025	20 Mei 2025	20 Mei 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Bukit Asam, Tbk tentang Pembangunan Flyover pada perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	
13	Kesepakatan Bersama	026/KSB/OTDA/I/2025	12 November 2025	12 November 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Alven (0895329 920323)
14	Kesepakatan Bersama	019/KSB/OTDA/I/2025			5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	

						Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah		
15	Perjanjian Kerja Sama	008/PKS/DKPP/I/2025			5 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	Meri Andayani (0813675 44739)
16	Perjanjian Kerja Sama	009/PKS/DKPP/I/2025			3 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	Meri Andayani (0813675 44739)
17	Perjanjian Kerja Sama	010/PKS/DISKOP/I/2025			3 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan	Herlina (0813156 92001)
18	Kesepakatan Bersama	021/KSB/OTDA/I/2025	22 Oktober 2025	22 Oktober 2030	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	Bu Ira (0813740 66008)

						Solok tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah		
19	Kesepakatan Bersama	022/KSB/OTDA/I/2025	22 Oktober 2025	22 Oktober 2030	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat	Pak Arif (0811660 8010)
20	Perjanjian Kerja Sama	030/PKS/DKPP/I/2025	22 Oktober 2025	22 Oktober 2030	5 tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
21	Perjanjian Kerja Sama	031/PKS/DKP/I/2025	22 Oktober 2025	22 Oktober 2030	5 tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Distribusi Perikanan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
22	Nota Kesepakatan	010/NK/OTDA/I/2025	15 Mei 2025	15 Mei 2030	5 tahun	Nota Kesepakatan Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sandra Afrizal

						Sumatera Selatan tentang Sinergi dan kerja sama dalam kegiatan Program Makan Bergizi Gratis.		
23	Kesepakatan Bersama	013/KSB/OTDA/I/2025	18 Juli 2025	18 Juli 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Provinsi Sumatera Selatan	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Adi (0823732 13122)
24	Kesepakatan Bersama	014/KSB/OTDA/I/2025	22 Juli 2025	22 Juli 2030	5 Tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Sinergitas Penguatan Kapasitas dan Sinkronisasi Koordinasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak, Hak Asuh Anak, dan Hak Perempuan setelah Perceraian	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Said (0813732 78649)
25	Perjanjian Kerja Sama	006/PKS/DPP-PA/I/2025	22 Juli 2025			Perjanjian Kerja Sama antara Dinas	Dinas Pemberdayaa n Perempuan	Said (0813732 78649)

						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang	dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	
26	Kesepakatan Bersama	015/KSB/OTDA/I/2025	13 Agustus 2025			Kesepakatan Bersama antara Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelesaian Aset antara TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
27	Nota Kesepakatan	016/NK/OTDA/I/2025	12 September 2025	12 September 2030	5 Tahun	Nota Kesepakatan antara Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sultan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) 08153813 071
28	Nota Kesepakatan	017/NK/OTDA/I/2025	16 September 2025	16 September 2028	3 Tahun	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi	Aghata (0811713 300)

						Selatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Piutang Daerah	Sumatera Selatan	
29	Nota Kesepakatan	018/NK/OTDA/I/2025	18 September 2025	18 September 2028	3 Tahun	Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Dukungan Penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Mayang (0852739 04532)
30	Nota Kesepakatan	020/NK/OTDA/I/2025	30 September 2025	30 September 2030	5 Tahun	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Yose (0812781 56582)

						Selatan		
31	Nota Kesepakatan	023/NK/OTDA/I/2025	31 Oktober 2025	31 Oktober 2028	3 Tahun	Nota Kesepakatan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Imam (0821826 82270)
32	Nota Kesepakatan	024/NK/OTDA/I/2025	31 Oktober 2025	31 Oktober 2026	12 Bulan	Nota Kesepakatan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpulan Regional di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Imam (0821826 82270)
33	Nota Kesepakatan	025/NK/OTDA/I/2025	11 November 2025	11 November 2030	5 Tahun	Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemerintah Provinsi Sumatera	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Ayu (0896281 66355)

						Selatan tentang Pengembangan , Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah		
34	Nota Kesepakatan	027/NK/OTDA/I/2025	20 November 2025	20 November 2030	5 Tahun	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakata n Republik Indonesia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakata n Sumatera Selatan tentang Penyelenggara an Program Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasarakata n di Wilayah Sumatera Selatan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakata n Sumatera Selatan	Ade Gunawan (0812275 3677)
35	Nota Kesepakatan	028/NK/OTDA/I/2025	04 Desember 2025	04 Desember 2027	2 Tahun	Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	

Diharapkan pada tahun 2025 penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Harapan kedepan agar jumlah penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai aspek agar pelaksanaan MoU terlaksana dengan baik.

Perubahan Indikator Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2030 yang telah disahkan pada tahun 2025 dibulan oktober dengan sasaran **Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien.**

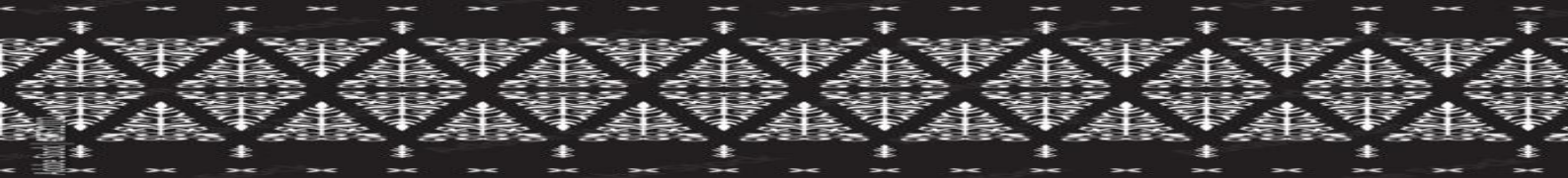
Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Jumlah	31	35	103,23

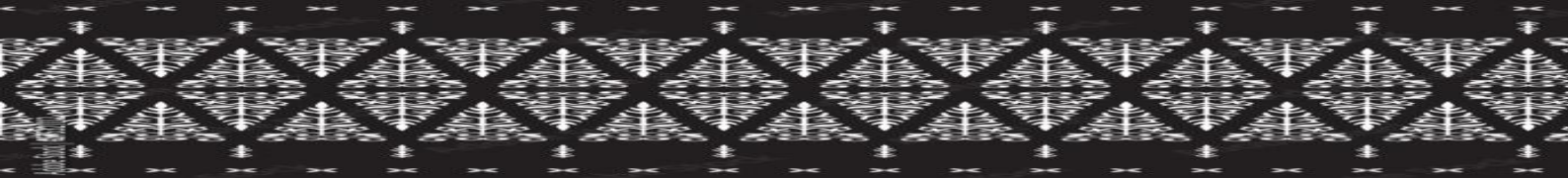
Perubahan Indikator Kinerja dari jumlah penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah menjadi Efektifitas Kerja Sama daerah sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan realisasi 32 sama dengan realisasi pada indikator diawal MoU.

Dari grafik diatas bisa dilihat peningkatan pada tahun 2023 s.d 2024 dan terjadi penurunan 2023 serta peningkatan ditahun 2025 Jumlah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.

Fasilitasi penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen terealisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Bandar Lampung tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan The International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Penanganan Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan, dan Kesenjangan Gender Khususnya pada Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan.

- 
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan The International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) tentang Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim di Sumatera Selatan.
 5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Palembang tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA-NG / Financial Management Information System (FMIS) yang terintegrasi dengan Bank Sumsel Babel dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jimmagro Inter Mulya tentang Pengembangan Inovasi Teknologi Produk Unggulan Daerah di Kawasan SSTP Sumatera Selatan.
 10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
 11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Ladang Karya Husada (Toko Ladang) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan Marketplace Lokal Toko Ladang di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 12. Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta.

- 
13. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
 14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Urusan pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pertukaran data dan/atau informasi tentang pelayanan publik, dan kegiatan lain yang disepakati.
 15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur tentang Urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah.
 17. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
 18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah III tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
 21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.

Diharapkan pada tahun 2024 penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Harapan kedepan agar jumlah penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai aspek agar pelaksanaan MoU terlaksana dengan baik.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Koodinasi Bidang-bidang Perekonomian** serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	90	78,04	86,71
2.	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	%	90	78,04	86,71

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi bidang-bidang perekonomian adalah sebagai berikut :

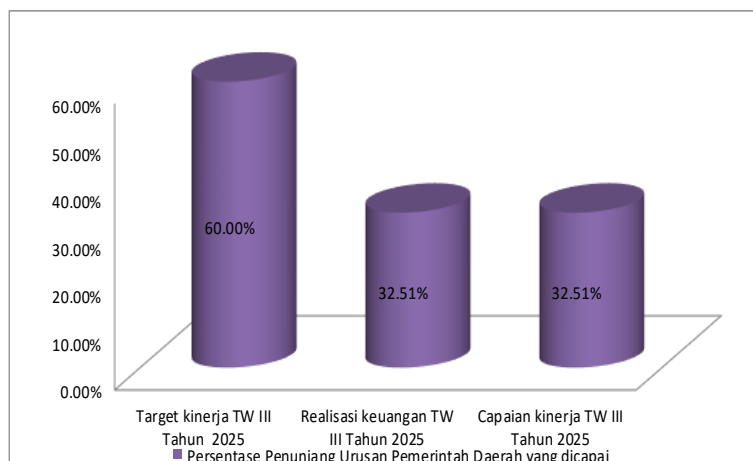
8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia

Persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% terealisasi 78,04% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (90%).
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (90%).
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (90%).
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 86,71% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 (dua) pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro dan 1 (satu) pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam yaitu koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian Triwulan Tiga Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 %	32,51%
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 %	
		Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	
		Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100 %	



Sasaran Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 Triwulan Ketiga ditargetkan/ sasaran capaian kinerja 60%, realisasi keuangan

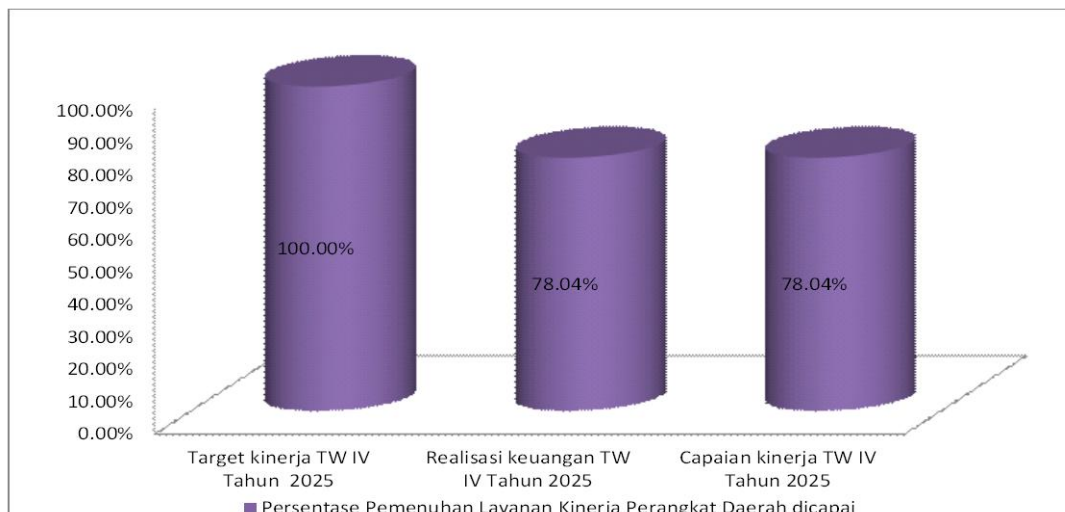
32,51% dan tingkat capaian kinerja 32,51%. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, ditunjang dengan adanya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dan Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Pada Triwulan Keempat sesuai dengan Renstra 2025–2030 Biro Perekonomian Mengalami Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja sesuai dengan RPJMD 2025–2029 dan INMEN 2 TAHUN 2025-1 sebagai berikut :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
--	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Triwulan IV Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Koordinasi Bidang-bidang Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan bidang Ekonomi yang tersedia	%	100 %	78,04 %
		Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik			
		Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD			

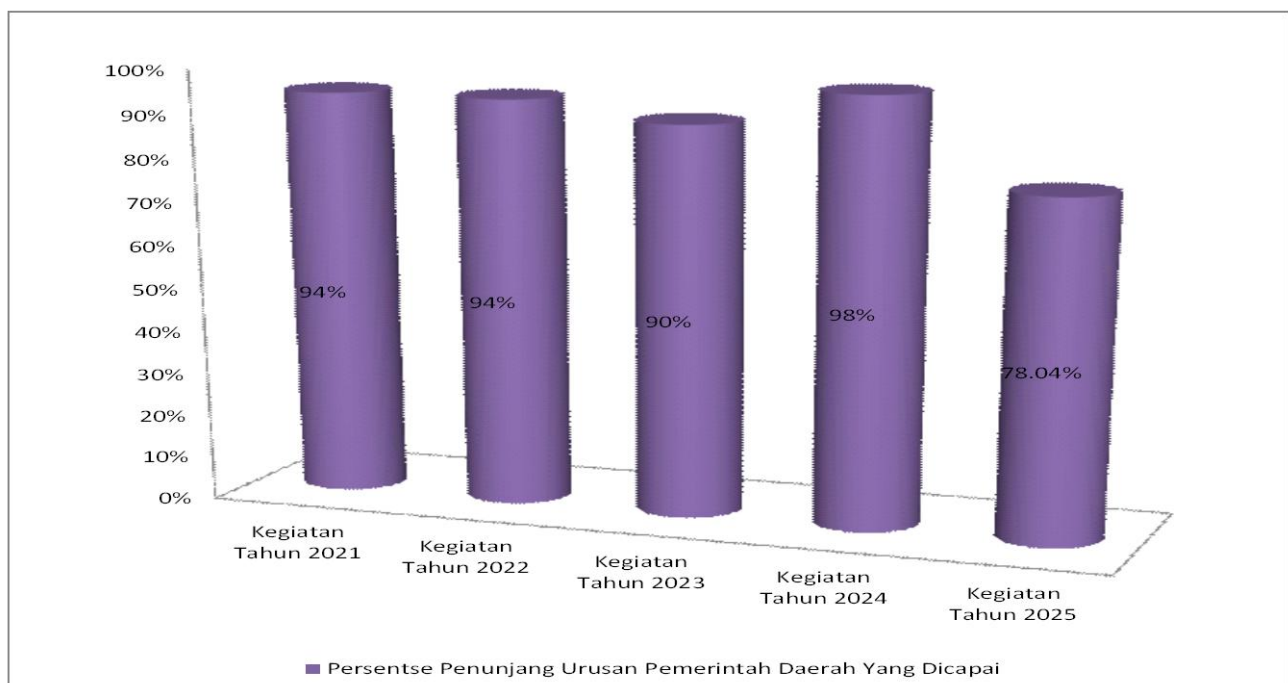


Sasaran Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana yang dicapai Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 Triwulan Keempat ditargetkan/ sasaran capaian kinerja 100%, realisasi keuangan 78,04% dan tingkat capaian kinerja 78,04%. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Fungsi Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Yang dicapai.

Capaian Kinerja Biro Perekonomian

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian
Meningkatnya Koordinasi Bidang-bidang Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan bidang Ekonomi yang tersedia	%	100	78,04	78,04	100	78,04
	Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik						
	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD						

Tahun Kegiatan		Perbandingan Capaian Tahun			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Kegiatan Tahun 2021	%	100	94%	94 %
2	Kegiatan Tahun 2022	%	100	94%	100 %
3	Kegiatan Tahun 2023	%	100	90%	100%
4	Kegiatan Tahun 2024	%	100	98%	98%
5	Kegiatan Tahun 2025	%	100	78,04%	78,04%



Perbandingan Sasaran nilai Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Dearah yang di Capai oleh Biro Perekonomian adalah sebagai berikut :

- Tahun 2021 dengan sasaran/target 100%, realisasi 94% dan tingkat capaian 94%.
- Tahun 2022 dengan sasaran/target 100%, realisasi sebesar 94% dan tingkat capaian 94%.
- Tahun 2023 dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 90%, dan tingkat capaian kinerja 90% mengalami penurunan sebesar 4%
- Tahun 2024 dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 98% dan tingkat capaian kinerja 98% mengalami kenaikan sebesar 8%.

- Tahun 2025 Triwulan Keempat realisasi keuangan sebesar 78,04% dan tingkat capaian kinerja 78,04%.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah selaku Sekretariat TPAKD dan TPID Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penerima TPAKD Award Tahun 2025 dan TPID Award Tahun 2025 terbaik se Wilayah Sumatera. Biro Perekonomian mengantarkan Gubernur Sumatera Selatan Terpilih sebagai Top Pembina BUMD 2025. Di bawah kepemimpinannya, BUMD di Sumatera Selatan didorong untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan, sejalan dengan visi "Sumsel Maju Untuk Semua".



Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat paling bawah sampai atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu menyusun Renja Biro Perekonomian pada semua indikator kegiatan disesuaikan dengan cascading Biro Perekonomian;
3. Kinerja Biro Perekonomian disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra dengan demikian pimpinan Kepala Biro harus komitmen dengan penyusunan Renja capaian dengan cascading;
4. Menambah Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 s.d 2025 persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia setiap tahunnya masih mencapai 86,71% tidak ada perubahan yang signifikan kinerja terserap dengan baik dengan adanya program dan kegiatan yang berorientasi kepada persentase data informasi pembangunan

ekonomi yang tersedia yaitu : **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.**

Keberhasilan pencapaian Indikator persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia di dukung oleh : Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.

8.2 Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi PAD

Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi PAD pada tahun 2025 ditargetkan 90% terealisasi 78,04% sebesar 86,71% hal ini disebabkan ada program pembangunan ekonomi dan program peningkatan kinerja BUMD yang menunjang anggaran ini terserapnya dengan baik. Adapun program/kegiatan yang memberikan kontribusi PAD yaitu :

1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Rp 900.870.000 (Sembilan Ratus Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD dengan pagu anggaran Rp 900.870.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 671.345.940,- persentase realisasi keuangan 74,52%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir yang memperoleh hasil yang positif, artinya PAD mengalami peningkatan.hal ini disebabkan lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi, dapat dilihat pada grafik diatas serta mengalami peningkatan ditahun 2025.

Untuk mendukung indikator tersebut di atas, telah di programkan kegiatan berikut upaya yang dilakukan untuk menunjang persentase BUMD yang memberikan kontribusi PAD yaitu **Program Perekonomian dan Pembangunan.**

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi non tunai.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertip dalam memenuhi kewajibannya.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi yang terkait untuk pendataan penerimaan wajib pajak baru.
4. Penyempurnaan Sistem Pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem.
5. Ektensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.

Harapan kedepan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dengan langkah-langkah dibawah ini :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Progress ke depan BUMD :

1. Evaluasi terhadap Regulasi BUMD
2. Pembinaan terhadap BUMD

Rencana Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025:

Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia
1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD
6. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Mewujudkan Kestabilan Keamanan Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	90	100	111,11
2.	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	90	100	111,11

Capaian indikator kinerja dari sasaran mewujudkan kestabilan keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Kemanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas							
1. Meningkatnya Peringkat MTQ/STQH	%	80	100	125 % MTQN JUARA 5	90	100	111,11 % STQHN JUARA 3
2. Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar	%	80	100	125	90	100	111,11

9.1 Meningkatnya Peringkat MTQ

Meningkatnya Peringkat MTQ tahun ini menjadi STQ yang diadakan dengan target 90% terealisasi sebesar 100% yaitu 111,11%. Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri, Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor : 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomorklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Meningkatnya Peringkat STQH N Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% kegiatan terealisasi sebesar 100% diharapkan kegiatan STQH N Tahun 2025 terserap sebesar 100%.

Tabel capaian persentase meningkatnya peringkat STQH N yaitu :

No	Indikator	Target	Capaian	Hasil Capaian
1	Meningkatnya Peringkat STQH N Tahun 2025 1. Program Kesejahteraan Rakyat 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pada Sub Kegiatan Kelembagaan Bina Spiritual yang salah satu isi kegiatannya adalah melaksana-kan Fasilitasi MTQ/STQ	90	100	111,11

Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka capaian Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif dan Meningkatnya Peringkat STQH N melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait dalam hal perencanaan kegiatan.
2. Peningkatan standar, operasi dan prosedur penyediaan data dan informasi yang benar-benar diterapkan.
3. Perlunya penambahan Dewan Hakim dan Pelatih yang berstandar Nasional serta Peningkatan Pendidikan/Pelatihan Peserta STQ/MTQ.

9.2 Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Non Dasar

Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Dasar pada tahun 2025 ditarget sebesar 90% terealisasi sebesar 100%. Kegiatan sudah dilaksanakan pada tahun 2025 fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar dan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Non Dasar.

Tabel Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Dasar.

No	Indikator	Target	Capaian	Hasil Capaian
1	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan rakyat yang Efektif			95,54 %
	Program Kesejahteraan Rakyat,			
	1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	40%	40%	38,22 %
	a.Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			
	b.Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	30%	30%	28,66 %
	a.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
	b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial.			
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan.			
	3. Kegiatan fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	30%	30%	28,66 %
	a.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.			
	b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.			
	c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.			

Akuntabilitas Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 36.987.938.856.- dengan realisasi sebesar Rp. 35.336.827.724,- (95.54%).

Tabel Akuntabilitas Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang berkualitas	36.987.938.856.-	35.336.827.724,-	95,54%

Pada pelaporan ini Analisis Efisiensi Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari beberapa sasaran, yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai :

Tabel Analisis Efisiensi Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian (%)	Kinerja Rata-Rata Capaian (%) Keuangan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang berkualitas	111,11	93,66	17,45

Berdasarkan data ini Efisiensi Anggaran di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Program dan Kegiatan yang menjadi faktor pendorong keberhasilan dari Biro Kesejahteraan pada tahun 2025 yaitu Program Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual, kelembagaan bina spiritual dengan kegiatan fasilitasi MTQ/STQ yaitu :

- Kegiatan **STQH Tingkat Provinsi Sumatera Selatan** di laksanakan di **Kabupaten Pali** dari **tanggal 22 s.d 28 April 2025** diikuti peserta yang merupakan utusan 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dari hasil kegiatan STQH ini didapat qori qori'ah terbaik yang akan mewakili Sumsel di tingkat nasional. Adapun Peringkat STQH Tingkat Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

A. Juara Umum : Kotamadya Palembang

B. Juara II : Kabupaten Ogan Ilir

C. Juara III : Kabupaten Lahat

- Kegiatan STQH Tingkat Nasional di laksanakan di **Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)** pada **tanggal 9 s.d.19 Oktober 2025**, Adapun Peringkat STQH Tingkat Nasional adalah sebagai berikut :

A. Juara Umum : Provinsi Kalimantan Timur

B. Juara II : Provinsi DKI Jakarta

C. Juara III : Provinsi Sumatera Selatan

Kafilah Utusan Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih Peringkat ke-3 Tingkat Nasional.

Kegiatan MTQ KORPRI ke-9 Tingkat Nasional Tahun 2027 sedangkan untuk 2025 tidak diselenggarakan karena 2 tahun sekali dilaksanakan. Sedangkan Tahun 2024 Kafilah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 16 orang peserta dan 14 orang official berhasil meraih Juara Harapan I sebanyak 2 orang pada Cabang Khutbah Jum'at dan Tilawah Dewasa Pria.

Fasilitasi Haji.

Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahapan kegiatan ini yaitu, pelaksanaan seleksi calon Petugas Haji Daerah (PHD), Pelatihan dan Bimbingan Petugas Haji Daerah (PHD), pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan Provinsi Sumsel.

Dilaksanakan dalam bentuk beberapa kegiatan, diantaranya Sholat Jum'at bersama Gubernur Sumatera Selatan di masjid kantor dan masjid di lingkungan masyarakat kabupaten/kota se-Sumsel, tabligh akbar dalam rangka peringatan hari-hari besar Islam, dan fasilitasi kegiatan Natal Oikumene Kristen Katolik se-Sumatera Selatan.

Penyelenggaraan Festival Keagamaan (Qasidah).

Dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Oktober 2025 di Palembang Indah Mall dan diikuti oleh peserta yang merupakan utusan 17 kabupaten/kota se-Sumsel. Kategori yang dilombakan adalah kategori anak-anak putra dan putri, remaja putra dan putri, dewasa putra dan putri, group rebana putri klasik, dan hadroh.

**SASARAN
KESEPULUH**

**Berkembangnya Tata Pemerintahan
yang Baik**

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	3	100
2.	Persentase Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	100	125
3.	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	96,62	140,89
4.	Persentase Fasilitasi Sarana dan	%	100	94,94	94,94

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
	Prasarana yang Optimal				

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut

10.1 Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 3 Perangkat Daerah usulan yang dimasukan 3 PD sudah ditetapkan dalam produk hukum Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 14 Thun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan pada Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut ketentuan Pasal 208 ayat (1) Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan unsur pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

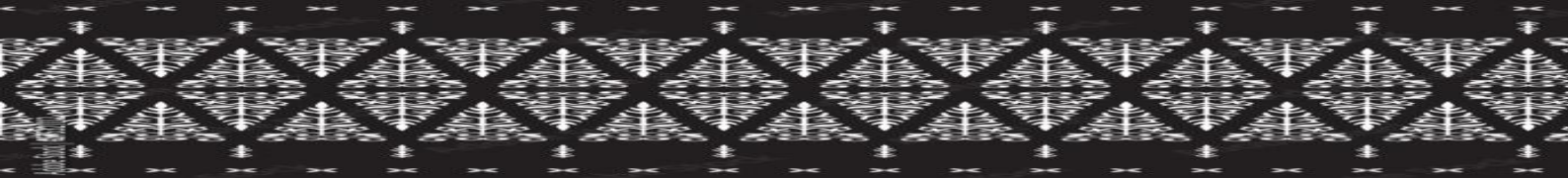
Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomr 14), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3), Perangkat Daerah dimaksud terdiri atas :

- Sekretariat Daerah Provinsi;
- Sekretariat DPRD Provinsi;
- Inspektorat Daerah Provinsi;
- Dinas Daerah Provinsi; dan

e. Badan Daerah Provinsi.

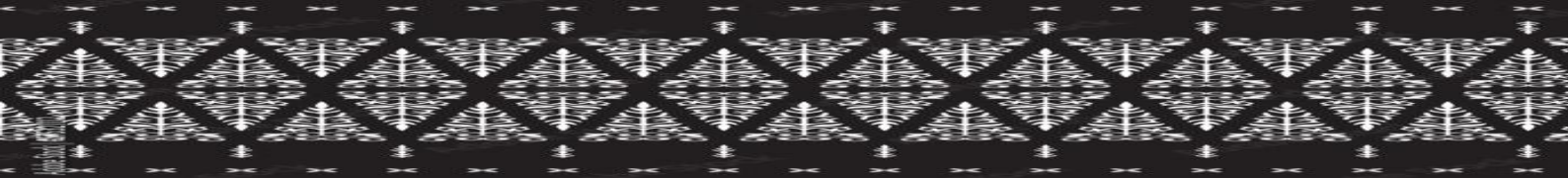
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang;
 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- 
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 20. Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 21. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 22. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
 24. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 26. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 27. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 28. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran.

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

- 
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan; dan
 9. Badan Penghubung Provinsi.

Keberhasilan capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penyusunan Perda organisasi perangkat daerah telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan penyusunan uraian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

10.2 Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada tahun 2023 ditargetkan 80% dan terealisasi 100% sebesar (125,00%). Hal ini terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah plus 9 (Biro) dan 3 (tiga) Staf Ahli yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan validasi Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerjanya.

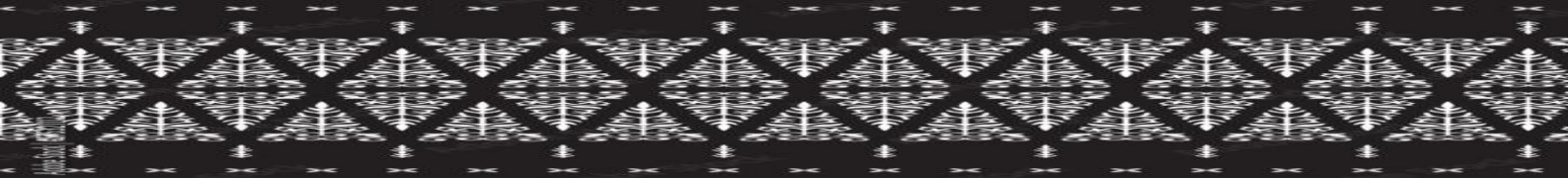
Beberapa manfaat yang didapat dari pelaksanaan anjab dan ABK ini antara lain :

1. Dengan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan maka telah dirumuskan syarat-syarat jabatan minimal.
2. dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini dikenal dengan istilah staf.
3. Dari ABK diperoleh jumlah beban kerja masing-masing perangkat daerah sehingga diketahui kekuatan pegawai dan kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan beban kerja serta sudah ditetapkan Keputusan Gubernur.

Realisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2023 yang mencapai 100% hal ini terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).

Oleh karena itu diperlukan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan



fungsi Perangkat Daerah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Simona Kemendagri bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Asistensi atau pendampingan dengan cara fasilitasi (konsultasi) pada proses penyusunan Anjab dan ABK bagi Perangkat Daerah yang perlu pengarahan lebih lanjut.

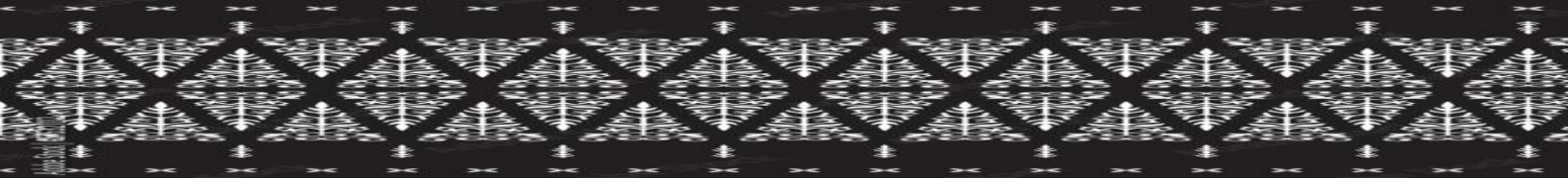
Capaian persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Analisis Jabatan dan analisis beban Kerja pada tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perangkat Daerah mengalami perubahan berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022, sehingga dokumen Anjab dan ABK harus dibuat kembali serta masih memerlukan tahapan lebih lanjut karena Dokumen Anjab dan ABK bukanlah pekerjaan yang sekali jadi, melainkan perlu secara bertahap dan memerlukan kajian lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkan kembali dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang hasil Anjab dan ABK.

Capaian persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Analisis Jabatan dan analisis beban Kerja pada tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan dan penurunan ditahun 2022 hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah secara otomatis tersebut dokumen Anjab dan ABK harus dibuat kembali serta masih memerlukan tahapan lebih lanjut karena Dokumen Anjab dan ABK bukanlah pekerjaan yang sekali jadi, melainkan perlu secara bertahap dan memerlukan kajian lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkan kembali dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang hasil Anjab dan ABK.

Beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja :

1. Faktor kurangnya sumber daya aparatur (analisi jabatan) di Biro Organisasi pada saat ini yang terdiri dari 1 (satu) Kepala bagian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian salah satunya adalah Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan untuk pelaksana dan tenaga analisis jabatan ada 1 (satu) orang yang seharusnya dibutuhkan 6 (enam) orang.
2. Faktor kurangnya tenaga analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mampu melakukan Anjab dan ABK.
3. Intesitas koordinasi oleh Perangkat Daerah yang anjab dan ABKnya belum maksimal oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran PNS maupun Perangkat Daerah guna penyelesaian dan kesempurnaan hasil Anjab dan ABK.

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja didukung dengan adanya program Penataan Organisasi dengan kegiatan



fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan dengan sub kegiatan penataan analisis jabatan. Diharapkan pada tahun 2023 Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat terlaksana dengan adanya penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

10.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan

Capaian pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Triwulan IV sebesar **86,20%**. Capaian tersebut merupakan pelaksanaan dari ke-enam urusan bidang dari triwulan I s.d III Tahun 2024. Sedangkan untuk Tahun 2025, hasil SPM yang sudah keluar yaitu pada triwulan I. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, capaian pelaksanaan SPM sebesar **48,35%**. Capaian pada triwulan I Tahun 2025 ini sudah melewati target yaitu sebesar 25%. Hal ini terus mendapat perhatian dari Perangkat Daerah pengampu SPM untuk tetap sesuai memenuhi target setiap triwulannya sampai dengan triwulan IV sehingga mendapat nilai persentase yang maksimal untuk Tahun 2025. Penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang :

1. Urusan Bidang Pendidikan.
2. Urusan Bidang Kesehatan.
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum.
4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat.
5. Urusan Bidang Sosial.
6. Urusan Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Ada 5 unsur wajib urusan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi capaian penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yaitu dengan :

1. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM
2. Mengawal pengintegrasian kebutuhan pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara triwulanan terhadap progres penerapan SPM di masing-masing bidang urusan wajib pelayanan dasar.
4. Melaksanakan bimbingan teknis dan workshop tentang pemahaman indikator dan sub indikator SPM.

Grafik capaian SPM dari Tahun 2023 s.d 2025 tetap dalam kondisi stabil. Untuk pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik telah meluncurkan website pelaporan SPM yaitu Bangda.Sekber.SPM@gmail.com. Kedepannya Pemerintah Sumatera Selatan melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

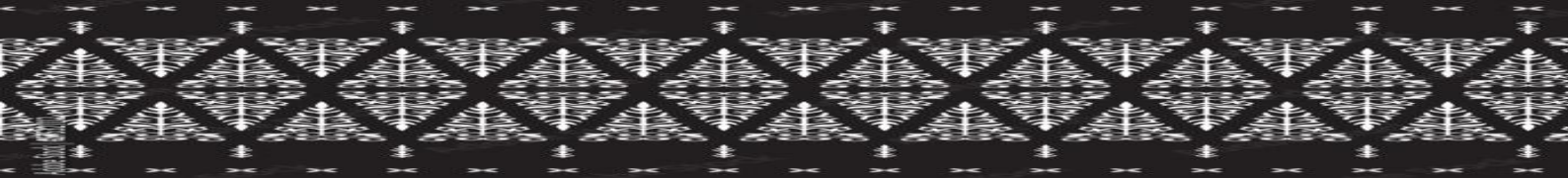
10.4 Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan terealisasi 94,94%, hal ini dikarenakan waktu kegiatan yang terbatas. Adapun Kegiatan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk mewujudkan indikator ini sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah bertambahnya kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor Perorangan 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV type EU4 GX AB MT NIK 2020, Kendaraan Bermotor Perorangan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV Blind Van Jenis Ambulance Vin 2020 keperluan Setda Provinsi Sumsel, Kendaraan Bermotor Penumpang 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Jenis Kendaraan Jenazah Plus Econo NIK 2020 Keperluan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor Penumpang Roda Dua Merk Kawasaki Semi Trail 150 cc Type KX-150 Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 20 unit, Kendaraan Bermotor Penumpang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Medium Bus Merk E 84G BC K Bus sedang Umum Jetbus MD Karoseri Adiputro Denso Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor penumpang 1 Toyota Inova Q A/T

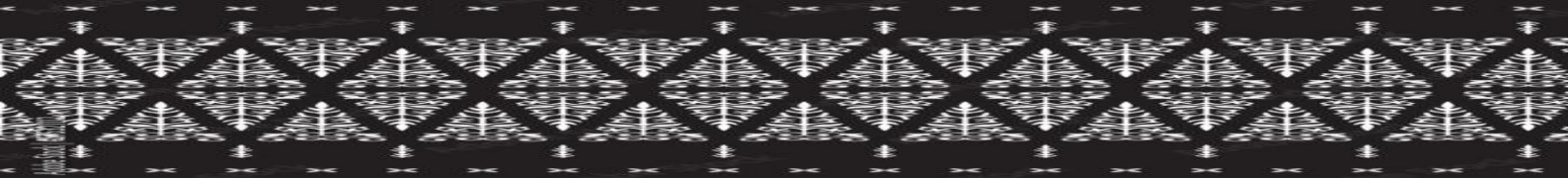
Venturer, 1 Toyota Inova V A/T Diesel, 2 Toyota Hi-Ace Premio, 3 Toyota Rush
Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor berpenumpang 1
(satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Xpander Cross 1.5 Plus 4x2 AT Thn
2021 Keperluan Biro Pemerintahan & Otonomi, Kendaraan Bermotor Penumpang
Roda 4 Jenis Ambulance Merk Suzuki APV FE GE PS DEL Van MT Econo 1 Vin
2021 Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor berpenumpang 1 Unit
Merk Toyota Hilux Double Cabin 2,4 G(4x4) Biro Umper&3 Unit Merk Toyota New
Rush 1,5 M/T Biro Perekonomian, Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) sepeda
Motor Semi Trail Merk Yamaha WR 155R sebanyak 3 (tiga) unit Keperluan Setda
Provinsi Sumatera Selatan, 1 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Merk Kawasaki Semi
Trail 150 cc Type KX-150 sebanyak 10 unit Keperluan Setda, Kendaraan Bermotor
Beroda Dua Merk Yamaha sebanyak 2 (dua) unit Keperluan Setda Provinsi
Sumatera Selatan untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 yaitu kendaraan bermotor
roda empat 3 unit merk toyota new rush 1,5 GR Sport, 4 unit merk suzuki APV GX
AB M/T, 4 unit merk Hino GB 150, 1 Unit mobil tangki air merk misubishi centre FE
74 HD, 2 Unit toyota new kijang innova 2.4 G A/T Diesel, 2 Unit toyota new Hilux DC
2.4 V, 3 Unit merk Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G, 2 Unit Toyota Hi Ace Premio 2.8
M/T, 1 UNIT Merk Suzuki APX GX Ambulace tipe transport, Kendaraan bermotor
beroda tiga pengangkut sampah sebanyak 1 unit merk Viar Karya 200 (Long), 3 unit
merk Kawasaki KLX 150, Kendaraan bermotor beroda dua Yamaha Xride, 13 unit
sepeda motor listrik. Di Tahun 2023 ditargetkan jumlah unit kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang disediakan; kendaraan roda empat sebanyak 22
unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 12 unit

2. Pengadaan Alat Besar berupa tractor milik Sekretariat Daerah. Di Tahun 2023 ditargetkan jumlah unit alat besar yang disediakan sebanyak 2 unit
3. Pengadaan Meubel, hasil yang dicapai adalah bertambahnya peralatan dan perlengkapan alat rumah tangga milik Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pengadaan Mebel (Karpas, Under Layar, Gordeng dan Vitrase) Keperluan Ruang Gubernur Sumsel, Pengadaan Mebel (Karpas) Keperluan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Mebel Peralatan Kantor (Mebel) keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Mebel I Meja Rapat Pejabat dan Kursi Rapat Pejabat Keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Meja Rapat Pejabat dan Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Keperluan Sekretariat Daerah Prov.Sumsel, Pengadaan Modal Lemari dan Arsip Pejabat Berupa Pigura/Frame Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Lemari & Arsip Pejabat Pengadaan Mebel Meja & Kursi Kerja/Rapat keperluan Sekretariat Daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu tersedianya meubelair berupa meja,



kursi dan sofa untuk keperluan di Griya Agung. Di Tahun 2025 ditargetkan jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 20 jenis.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Pengadaan Bendera dan Umbul-umbul keperluan Setda Provinsi Sumsel, Bendera Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Bendera Merah Putih keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Komputer Unit Lainnya Keperluan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Kantor Lainnya keperluan Setda Provinsi Sumsel, Pengadaan Mebel dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Modal Komputer & Modal Peralatan Personal Komputer keperluan Biro Perekonomian, Pengadaan Alat Pendingin keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Peralatan Studio Audio keperluan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Peralatan Studio Audio Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Peralatan Studio Audio (Sound System Mobile) Keperluan Gubernur Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Kantor Lainnya & Blnj. Modal Komputer Unit Lainnya Keperluan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Komputer Unit Lainnya keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
5. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, hasil yang dicapai adalah Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Perorangan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah Pembayaran Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan, Pembelian Bahan Bakar Minyak Untuk keperluan kendaraan Dinas Roda 4(empat) & Roda 2(dua) pada Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Setda Provinsi Sumatera Selatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemeliharaan Meubel, hasil yang dicapai adalah Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Leter L & Perbaikan Kursi Sofa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Mebel (Service Meja, Service Lemari, Perbaikan Filling&Alat Lainnya) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Ruang Sriwijaya 3 Room Bandara SMB II Palembang,

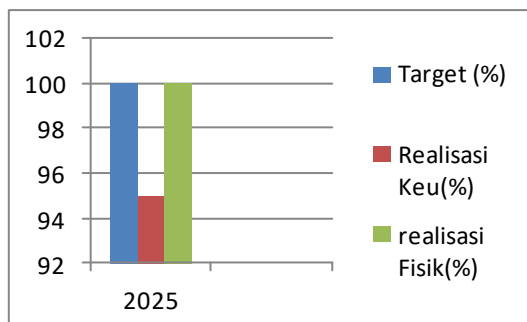


Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Ruang Sriwijaya 1 Room Bandara SMB II Palembang, perbaikan dan service politur meja, lemari, kursi dan peralatan lainnya pada Setda Prov.Sumsel, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-mebel keperluan ruang sriwijaya I VIP Room Bandara SMB II, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-mebel keperluan ruang Lobby VIP Room Bandara SMB II, keperluan Ruang Sriwijaya III, perbaikan & service politur meja, lemari, kursi & peralatan lainnya pada auditorium Sekretariat Daerah. Di Tahun 2023 kegiatan pemeliharaan mebel ditargetkan jumlah mebel yang terpelihara sebanyak 18 aset bangunan dan gedung kantor

8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pembelian Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kebutuhan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pembelian Disinfektan Kebutuhan Setda dan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, belanja Jasa Tenaga Kebersihan utk di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Griya Agung Luar & Luar Rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan Serta Vip Room Bandara Intl SMB II, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan utk di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Griya Agung Luar & Luar Rumdin Gubernur Sumatera Selatan Serta Vip Room Bandara Intl SMB II, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat & Pra Desain Arsitektural Renovasi Interior Gedung Auditorium Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rehabilitasi Pagar dan Taman Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Pagar & Taman Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gedung Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Sumsel, Renovasi Kolam Air Mancur Belakang Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Gedung Dharma Wanita Dempo Provinsi Sumatera Selatan, Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Koinstruksi Bangunan Gedung Atap Gedung Dharma Wanita Rajawali, Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pagar & Taman Griya Agung, Konsultasi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Serbaguna Jakabaring Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Perbaikan Ruang Kerja Karo & Kabag Biro Kesra Provinsi Sumatera Selatan, Biro Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, Biro Administrasi Pemerintahan.

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Gedung Kantor yang nyaman, Meningkatkan kinerja dan kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegawai. Outputnya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) bulan Juli, Agustus, September dan Oktober TA 2021, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perbaikan/Service/Spare Part) di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perbaikan/Service/Spare Part CCTV dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer unit Lainnya (Pemasangan & Instalasi LED Videotron Ruang Rapat Bina Praja) TA 2021, Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Electric Generating (Genset) di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Elektrik Generating Set (Pemeliharaan rutin/berkala Genset di Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan), Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Pompa Air& Alat Elektronik Lainnya. Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (Pemeliharaan rutin AC di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan).
11. Pemeliharaan Aset tidak berwujud adalah pembayaran jasa konversi aplikasi/sistem informasi pekerjaan upgrade Aplikasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi Sumsel. Di Tahun 2023 kegiatan pemeliharaan aset tidak berwujud ditargetkan jumlah unit aset tidak berwujud yang terpelihara/terehabilitasi sebanyak 10 unit.
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah penyediaan alat kontruksi jaringan air kebutuhan Setda Provinsi Sumsel, penyediaan alat listrik kebutuhan Setda Provinsi Sumsel, penyediaan disinfektan dan alat kebersihan untuk keperluan Setda Prov.Sumsel, pembayaran jasa tenaga kebersihan (jasa Cleaning Service) di lingkungan Setda Provinsi Sumsel, pembayaran jasa konsultasi perencanaan arsitektur- jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan, pembayaran jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi gedung kantor kantor dan bangunan, pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung, pemeliharaan gedung kantor dan bangunan rumah dinas dan jabatan. Di Tahun 2025 kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan pada Administrasi
Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana



**Grafik Persentase Penyerapan Realisasi
Keuangan Program/Kegiatan Biro Umum dan
Perlengkapan**

pada Tahun 2025 ditargetkan 100%, terealisasi keuangan 94,94%, dan fisik 100% pada Biro Umum dan Perlengkapan.

Kegiatan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk mewujudkan					
No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik %	Output
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.646.279.700	2.628.400.000	99,32	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan
2	Pengadaan mebel	2.530.000.000	2.500.716.104	98,84	Tersedianya meubeler
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000.000	10.977.954.737	99,80	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor
4	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	802.000.000	410.243.751	51,15	Jumlah biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan pereorangan dinas
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.475.364.943	9.295.307.114	88,73	Jumlah biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
6	Pemeliharaan Meubel	600.000.000	586.932.000	97,82	Jumlah mebel yang terpelihara
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.917.605.360	45.712.333.232	95,40	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik

8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.571.819.952	1.507.799.992	95,93	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dang dung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik
	TOTAL	76.607.613.000	66.727.835.858	91	

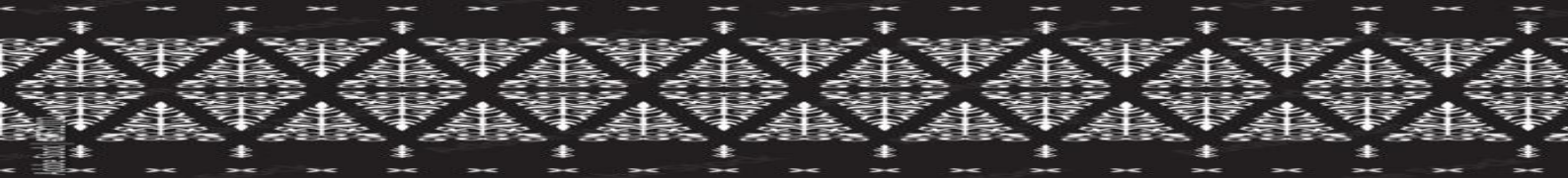
Pada tahun 2025 persentase sarana dan prasarana terserap 100% dibandingkan tahun 2023 s.d 2025, hal ini disebabkan karena keterbatasan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tenggang waktu yang tidak singkat serta karena pengalihfungsian kinerja yang lebih diutamakan untuk dilakukan pada tahun 2025.

Dari uraian Capaian Kinerja di atas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan sasaran dan kinerja pada Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun demikian masih terdapat masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktifitas perkantoran membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga membutuhkan pemeliharaan agar makasimal.
3. Mobilisasi dan tempat menyimpan Bahan Material Bangunan yang terbatas.
4. Aset/barang inventaris yang dikelola banyak barang yang telah lama/tua, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang relatif besar.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas, seperti pengerjaan rehabilitasi sedang gedung/kantor waktu pelaksanaan bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktivitas perkantoran.
6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun upaya yang dilakukan agar sarana dan prasarana tetap optimal dan terealisasi secara maksimal yaitu :

1. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Meningkatkan pengawasan pekerjaan dan menambah pekerja agar pekerjaan selesai lebih cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Melaksanakan kegiatan Perencanaan di awal tahun anggaran.
4. Melaksanakan tender di awal tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu/tidak melewati tahun anggaran.

- 
5. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
 6. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
 7. Mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aktifitas perkantoran.
 8. Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun solusi terhadap aset/barang inventaris yang dalam kondisi rusak dan memerlukan biaya pemeliharaan yang besar dilakukan inventaris untuk kemudian diusulkan dihapus/dilelang.

III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Sebelum Perubahan Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI *	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.233.324.000,-	1.232.919.160,-	99,97
2.	Penataan Peraturan Perundang – undangan	593.794.866,-	592.692.541,-	99,81
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	30.378.050.233,-	29.758.358.593,-	97,96
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	80.000.000,-	78.000.000,-	97,50
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	675.750.000,-	574.064.228,-	84,95
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	5.171.035.850,-	4.817.930.171,-	93,17
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	609.168.000,-	599.124.629,-	98,35
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.722.348.575,-	1.186.524.410,-	68,89
9.	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	35.603.937.210,-	34.365.335.841,-	96,52
10.	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	138.503.069.877.497,-	124.594.655.635,-	92,67

Tabel Sesudah Perubahan Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI *	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	278.384.305.838,-	228.594.665.635,-	82,11

A. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat empat sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Sebelum Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA- RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	99,97	98,20	1,77
2.	Penataan Peraturan Perundang – undangan	99,81	95,78	4,03
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	97,96	112,54	(14,58)
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	97,50	100,50	(3)
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	84,95	95,27	(10,32)
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	93,17	103,67	(10,5)
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	98,35	137,50	(39,15)
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	68,89	86,71	(17,82)
9.	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	96,52	166,67	(70,15)
10.	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	92,67	115,21	(22,54)

Tabel Efisiensi Sesudah Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA- RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	82,11	102,93	(20,82)

Efisiensi anggaran di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024. Hasil dari penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* dalam perencanaan periode berikutnya. Dirumuskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator dengan capaian di atas 100%, seperti Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta beberapa indikator tata kelola pemerintahan lainnya.
2. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada kategori baik, ditunjukkan oleh nilai LPPD sebesar 3,2405 dengan kategori sedang dan capaian mendekati target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan sesuai perencanaan meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.
3. Akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi mengalami peningkatan, terlihat dari peningkatan nilai SAKIP serta upaya perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja, penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, serta penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi.
4. Pelayanan publik juga menunjukkan kualitas yang sangat baik, dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,81 yang berada pada kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah telah memenuhi harapan masyarakat.
5. Beberapa indikator masih memerlukan peningkatan, seperti efektivitas pengelolaan pembangunan, kontribusi BUMD terhadap PAD, serta ketersediaan data informasi pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya mencapai target optimal.
6. Perubahan Renstra pada tahun 2025–2030 membawa penyesuaian sasaran dan indikator kinerja, sehingga ke depan diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen

seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan:

kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan capaian yang tinggi dan cukup efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target strategis jangka menengah sesuai Renstra terbaru.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 17 Maret 2026
Sekretaris Daerah,



Edward Candra, M.H
Pemimpin Utama (IV/e)
NIP. 197209061992011002